



**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANGGAI NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025**





BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka perlu

menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2848);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2848) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Isi dan Uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Evaluasi pelaksanaan rkpd semester 1 (satu) tahun 2025;
Bab III : Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
Bab IV : Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
Bab V : Rencana kerja dan pendanaan daerah;
Bab VI : Penutup.

- (2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati ini diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,
MOH. RAMLI TONGKO



PERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 NOMOR 2906

Kata Pengantar

Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Semoga Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam rangka menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah serta dapat memenuhi harapan semua pihak untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai secara berkelanjutan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN 2025	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-1
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025	III-1
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025	III-20
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Perubahan Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2025 ..	V-1
5.2 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	V-10
BAB VI : PENUTUP	VI-1

Daftar Tabel

Tabel	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II-16
Tabel	3.1	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024	III-5
Tabel	3.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah).....	III-7
Tabel	3.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah).....	III-8
Tabel	3.4	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020–2024	III-9
Tabel	3.5	PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024	III-11
Tabel	3.6	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-19
Tabel	3.7	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 (Rupiah)	III-26
Tabel	3.8	Pendapatan Daerah dan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-29
Tabel	3.9	Belanja Daerah dan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025	III-40
Tabel	3.10	Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 (Rupiah)	III-45
Tabel	4.1	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2025	IV-14
Tabel	4.2	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan	

		Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025	IV-17
Tabel	4.3	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Daerah Kabupaten Banggai tahun 2025	IV-24
Tabel	4.4	Persandingan Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi tengah dan Kabupaten Banggai Tahun 2025	IV-27
Tabel	5.1	Organisasi Perangkat Daerah/Perangkat Daerah yang melakukan Penambahan, Pengurangan dan Penghapusan Kegiatan Tahun 2025	V-5
Tabel	5.2	Perubahan Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025	V-10
Tabel	5.3	Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah	V-11

Daftar Gambar

Gambar 3.1	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai (Juta Rupiah) Tahun 2020–2024	III-4
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024 (%)	III-9
Gambar 3.3	Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024	III-12
Gambar 3.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019–2024	III-13
Gambar 3.5	Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024	III-14
Gambar 3.6	Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024 ..	III-15
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2014–2024	III-17
Gambar 3.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2017–2024	III-17
Gambar 4.1	Visi dan Misi Presiden RI Periode 2025–2029.....	IV-2
Gambar 4.2	17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	IV-3
Gambar 4.3	Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional...	IV-4
Gambar 4.4	Sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-5
Gambar 4.5	Visi dan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026.	IV-11
Gambar 4.6	Tema RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	IV-22
Gambar 4.7	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025.....	IV-23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor : 13 Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebagai penjabaran tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026. RKPD Tahun 2025 disusun untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Banggai guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, melalui sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat 5 menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) s/d (9) disebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



- d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan dan /atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta selaras dengan prioritas Pembangunan nasional berdasarkan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2025 dan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Nomor 143);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2045.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 yaitu untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan daerah Kabupaten Banggai sebagai akibat dari adanya beberapa perubahan asumsi yang sudah ditetapkan, sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025. Sedangkan Tujuan Perubahan RKPD 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, antar sektor pembangunan, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) terutama indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan memuat uraian tentang : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2025, yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Banggai Tahun 2025 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya.
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat uraian tentang : Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun



2025 serta Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah memuat uraian tentang perubahan Tujuan, Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah memuat uraian tentang perubahan rencana program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah beserta Perangkat Daerah pengampunya disertai perubahan kerangka pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025.

BAB VI Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Sebagaimana penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan tahun berjalan di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran kinerja memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya.

2.1.1 REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Dinas Pendidikan

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan tahun 2025 sebesar Rp665.070.255.664.- sampai dengan Triwulan I realisasi capaian kinerja program sebesar 2%.



2. Urusan Kesehatan

a. Dinas Kesehatan

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2025 Rp340.640.813.865.- Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar Rp51.910.499.571 atau sekitar 15%, sedangkan realisasi Capaian Pogram Kegiatan 14%.

b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Alokasi anggaran RSUD untuk tahun 2025 Sebesar Rp185.366.145.689.- Sampai dengan Triwulan I keuangan yang telah terealisasi sebesar Rp14.682.164.386 atau sekitar 7.9%, sedangkan realisasi Capaian Program Kegiatan sebesar 7.9%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun pada tahun 2025 sebesar Rp462.774.972.524 sampai dengan Triwulan I realisasi pada sector keuangan sebesar 1,43%. sedangkan realisasi kinera program masih 0%.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman anggaran tahun 2025 sebesar Rp21.809.049.255. sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 21,6%. sedangkan realisasi capaian kinerja program sebesar 34,76%.



5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebesar Rp21.362.227.002 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 21,05%. sedangkan realisasi fisik sebesar 0,13%.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 sebesar Rp15.409.346.971 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 20,37%.

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebesar Rp6.550.698.530,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar Rp773.703.931,- atau sekitar 6.13%, sedangkan realisasi Capaian kinerja Program sebesar 0% (belum ada realisasi).

6. Urusan Sosial

a. Dinas Sosial

Alokasi anggaran Dinas Sosial tahun 2025 sebesar Rp26.057.823.625,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 707.256.651 atau sekitar 2,7%. sedangkan realisasi capaian kinerja Program sebesar 9,3%.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 sebesar Rp6.674.122.524,-



sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 0%. sedangkan realisasi capaian kinerja Program sebesar 22.01%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Alokasi anggaran Pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 sebesar Rp21.154.636.147,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 7,1%. sedangkan realisasi capaian kinerja program sebesar 33.33%.

3. Urusan Pangan dan Pertanian.

a. Dinas Ketahanan Pangan.

Alokasi anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan Pada Tahun 2025 sebesar Rp13.222.917.750 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan pada Dinas Keahanan Pangan sebesar Rp1.765.620.745,- atau sekitar 13,35%. sedangkan realisasi Capaian Kinerja Program masih sebesar 7,7%.

b. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan.

Alokasi anggaran untuk Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp104.072.860.207,- sampai dengan Triwulan I untuk realisasi keuangan pada Dinas Keahanan Pangan hanya sebesar Rp4.183.149.204,- atau sekitar 4,02%. sedangkan realisasi Capaian Kinerja Program hanya sebesar 2%.



c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Alokasi anggaran untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 sebesar Rp34.702.878.638,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar Rp2.618.307.058 atau sebesar 7,5%%. sedangkan realisasi capaian kinerja program sebesar 9,12%.

4. Urusan Lingkungan Hidup

a. Dinas Lingkungan Hidup.

Anggaran alokasi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebesar Rp35.714.606.463,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar Rp5.823.466.120,- atau sebesar 16,31%. sedangkan realisasi capaian kinerja Program sebesar 5,60%.

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. alokasi anggaran tahun 2025 Rp14.789.965.584,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 16,89%. sedangkan realisasi Capaian kinerja program masih 0% disebabkan karena peraturan – peraturan pendukung belum ada.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja program Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 15,18%, sedangkan untuk Alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan



Masyarakat Desa sampai dengan Triwulan I sebesar Rp19.092.355.874,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.897.789.041,- atau sebesar 15,18%.

7. Urusan Perhubungan.

a. Dinas Perhubungan.

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp32.125.606.879.- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 3.693.412.478 atau sekitar 11,5%. sedangkan realisasi Capaian Kinerja Program sebesar 12%.

8. Urusan Komunikasi dan Informatika.

a. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebesar Rp31.257.351.345.- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan masih 0% sedangkan realisasicapaian kinerja program sebesar 24%.

9. Urusan Koperasi dan UKM.

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Tahun 2025 sebesar Rp11.931.22.,474.- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 9,21%. sedangkan realisasi capaian kinerja program sebesar 15,86%.

10. Urusan Penanaman Modal.

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 berdasarkan data pagu anggaran sebesar



Rp15.961.089.573. sedangkan berdasarkan data yang dilaporkan Target keuangan tahun 2025 sebesar Rp15.961.609.673,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 9.38%. sedangkan realisasi Capaian Kinerja Program 6.65% .

11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Alokasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2025 sebesar Rp22.584.429.024.- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan pada Dinas Kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1.295.110.061 atau sekitar 5,73%. sedangkan realisasi capaian kinerja program sebesar 6%.

12. Urusan Perpustakaan.

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp11.401.642.925.- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan dan capaian kinerja program pada dinas perpustakaan dan kearsipan sebesar 20,3%.

Urusan Pemerintahan Pilihan.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan.

a. Dinas Kelautan dan Perikanan.

Alokasi anggaran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebesar Rp20,002,755,396. sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar Rp1.795.064.646 (8,97%) sedangkan realisasi capaian kinerja Program masih 0,09%.



2. Urusan Pariwisata.

a. Dinas Pariwisata.

Alokasi anggaran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebesar Rp12.024.373.868 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar Rp14.237.500 (0,12%) sedangkan realisasi capaian kinerja Program sebesar 37,8%.

3. Urusan Perdagangan.

a. Dinas Perdagangan.

Alokasi anggaran untuk Dinas Perdagangan Tahun 2025 sebesar Rp13.933.092.019,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 12,90%. sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 17,8%.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Badan Perencanaan Daerah

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Daerah sebesar Rp27.347.022.985,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar Rp.2.186.102.719,- atau sebesar 2,44%. sedangkan realisasi fisik sebesar 7,98%, sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 31,56%.

2. Penelitian dan Pengembangan

a. Badan Riset Inovasi Daerah

Alokasi anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp14.124.656.644,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan sebesar 13,75% atau sebesar Rp1.941.795.931,- sedangkan realisasi capaian kinerja program sebesar 11%.



3. Keuangan

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Alokasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 yaitu sebesar Rp452.524.752.276,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan pada Badan Pengalolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp56.085.503.363 atau sebesar 12,39%, sedangkan realisasi Capaian Program sebesar 24%.

b. Badan Pendapatan Daerah.

Alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp24.852.037.884,- untuk capaian sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.956.575.460,- atau sekitar 7,87%. sedangkan realisasi Capaian Kinerja Program sebesar 21,13%.

4. Kepegawaian

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan pagu alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebesar Rp20.212.317.165 namun pagu angaran yang dilaporkan berdasarkan data evaluasi pelaksanaan Program dan target keuangan sebesar Rp10.465.157.120,- dengan mengacu pada target keuangan yang dilaporkan tersebut sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan pada BKPSDM sebesar 2,10%. sedangkan realisasi



Capaian Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Berjalan sebesar 2,10%.

Fungsi Penunjang Lainnya

1. Pengawasan

a. Inspektorat

Alokasi anggaran untuk Inspektorat Tahun 2025 sebesar Rp26.412.399.047,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan pada sekretariat DPRD sebesar Rp1.491.118.584 atau sekitar 5,64%. sedangkan realisasi Capaian Kinerja Program sebesar 9,13%.

2. Sekretariat DPRD

a. Sekretariat DPRD.

Alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebesar Rp57.474.005.260, sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan pada sekretariat DPRD sebesar Rp10.901.392.492 atau sekitar 18.96%. sedangkan realisasi Capaian Kinerja Program dan keluaran sebesar 19%.

3. Sekretariat Daerah

a. Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp174.020.330.404,- sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp18.862.829.568,- atau sebesar 1,08%. sedangkan realisasi Capaian Program sebesar 25%.

4. Urusan Kewilayahan.

a. Kecamatan Balantak Selatan.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Balantak Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 16,6% dengan Alokasi anggaran untuk



kecamatan Balantak Selatan tahun 2025 sebesar Rp7.314.193.462,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 6,32%.

b. Kecamatan Bunta.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Bunta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,77% dengan Alokasi anggaran untuk kecamatan Bunta tahun 2025 sebesar Rp10.232.350.324,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 7,66%.

c. Kecamatan Lobu.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Lobu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 2% dengan Alokasi anggaran untuk kecamatan Lobu tahun 2025 sebesar Rp7.805.895.278,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 3,5%.

d. Kecamatan Balantak Utara.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Balantak Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 2% dengan Alokasi anggaran untuk kecamatan Balantak Utara tahun 2025 sebesar Rp7.447.249.040,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 5%.

e. Kecamatan Batui.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Batui sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 12,59% dengan Alokasi anggaran untuk kecamatan Batui tahun 2025 sebesar Rp11.729.501.147,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp1.471.163.241,- atau sebesar 13%.



f. Kecamatan Balantak.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Balantak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagian besar belum terealisasi, sedangkan capaian realisasi keuangan pada kecamatan balantak baru mencapai 8,89% (Rp885.566.961) dari total Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp9.951.833.422,-

g. Kecamatan Bualemo.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Bualemo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 2,74% dengan Alokasi anggaran untuk kecamatan Bualemo tahun 2025 sebesar Rp8.094.654.804,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 5,05%.

h. Kecamatan Bunta.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Bunta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,77% dengan Alokasi anggaran untuk kecamatan Bunta tahun 2025 sebesar Rp784.060.297,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 7,7%.

i. Kecamatan Lamala.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Lamala sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3,97% dengan Alokasi anggaran untuk kecamatan Lamala tahun 2025 sebesar Rp8.528.327.302,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 6,44% atau sebesar Rp549.173.082

j. Kecamatan Luwuk Selatan.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Luwuk Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 21% dengan Alokasi anggaran untuk



kecamatan Luwuk Selatan tahun 2025 sebesar Rp14.815.101.660,-dengan capaian realisasi keuangan sebesar 10,89% atau sekitar Rp1.613.848.156,-

k. Kecamatan Masama.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Masama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 12% dengan Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp8.091.763.382,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 7%.

l. Kecamatan Nuhon.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Nuhon sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 28,74% dengan Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp8.574.662.734,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 8.18% atau sebesar Rp701.571.925,-

m. Kecamatan Toili Barat.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Toili Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 7% dengan Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp8.343.261.657,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 6,6%.

n. Kecamatan Luwuk Timur.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Masama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 3% dengan Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp8.236.770.595,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp439.481.541 atau sekitar 5.3%.



o. Kecamatan Luwuk Utara.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Masama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 4% dengan Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp11.652.075.151,- berdasarkan data dari OPD, dengan capaian realisasi keuangan sebesar 7.05%.

p. Kecamatan Batui Selatan.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Batui Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 7,34% dengan Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.596.575.887 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp451.058.729 atau 5,94%.

q. Kecamatan Kintom.

Alokasi anggaran yang terdapat pada kecamatan kintom tahun 2025 sebesar Rp11.052.843.119,- dengan saat ini capaian realisasi keuangan pada kecamatan Kintom baru mencapai Rp1.489.089.652,- atau 13.5%.

r. Kecamatan Moilong.

Alokasi anggaran tahun 2025 pada kecamatan Moilong sebesar Rp7.476.205.393,- dengan realisasi keuangan masih 0%.

s. Kecamatan Nambo.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Nambo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 4,87% dengan total Alokasi anggaran tahun 2025 setelah ditambah dengan anggaran kelurahan sehingga total keseluruhan anggaran sebesar Rp16.642.147.444,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp1.447.111.329,- atau 8,70%.



t. Kecamatan Pagimana.

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Pagimana sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 15.33% dengan Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp6.715.318.838 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp177.671.700,- atau 2,65%.

u. Kecamatan Toili Jaya

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Toili Jaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 7.06% dengan Alokasi anggaran tahun 2025 sejumlah Rp7.276.838.114,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp448.914.083,- atau 6,17%.

v. Kecamatan Luwuk

Capaian kinerja program untuk Kecamatan Luwuk sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 6,52% dengan Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp16.426.191.573,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp2.825.788.619,- atau 17,2%.

2.1.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2025 semester I, hasilnya dapat di gambarkan pada tabel 2.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
1	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Indeks Pembangunan Pendidikan Manusia									
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase pencapaian SPM Pendidikan Dasar	100%	56,08%	87,68%	83,51%	95,24%	80,00%	69,81%	69,81%	DINAS PENDIDIKAN
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini	N/A	84,90%	100%	67,38%	67,38%	N/A	76,14%	N/A	
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar	N/A	96,90%	100%	69,14%	69,14%	N/A	83,02%	N/A	
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang efektif menerapkan pengembangan kurikulum	95%	73,40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang memiliki ijazah Diploma (D.IV), S1, dan sertifikat pendidik pada satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non-formal/ Kesetaraan	95%	78,42%	100%	11,64%	11,64%	90%	45,03%	94,80%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
1 01 05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki izin Operasional	50%	92,50%	100%	34,10%	34,10%	40%	63,30%	100%	
1 01 06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang efektif mengembangkan bahasa dan sastra melalui kurikulum muatan lokal	50%	43,12%	75%	71,01%	94,68%	40%	57%	100%	
1 02 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia									
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang Kesehatan	100%	88,56%	100%	93%	93%	100%	98,03%	98,03%	DINAS KESEHATAN
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100%	87,25%	100%	89,66%	89,66%	95%	94,46%	94,46%	DINAS KESEHATAN
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	100%	68,67%	100%	60,40%	60,40%	95%	68,54%	68,54%	
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Upaya Promotif dan Preventif	100%	75,62%	100%	95,80%	95,80%	95%	95,71%	95,71%	
1 03 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Indeks Infrastruktur Kabupaten									



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	78,00%	0.013%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	98,27%	81,65%	93,00%	87,36%	93,94%	88,27%	84,50%	85,99%	
1 03 04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase prasarana pengolahan persampahan yang tersedia	100%	51,08%	85,51%	85,51%	100%	N/A	68,30%	68,30%	
1 03 05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	93,10%	60,22%	92,22%	83,37%	90,40%	83,10%	71,80%	77,12%	
1 03 06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase berfungsi Baik	93,79%	56,30%	83,79%	100%	119,35%	83,79%	78,15%	88,33%	
1 03 07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan/setapak berfungsi baik kawasan pemukiman	100%	71,08%	N/A	N/A	N/A	N/A	35,54%	35,54%	
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang memiliki persetujuan bangunan gedung	90,10%	56,18%	65,07%	58,07%	89,24%	80,10%	57,13%	63,40%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah Lokasi yang ditetapkan rencana tata bangunan dan lingkungannya	29 Lokasi	29 Lokasi	29 Lokasi	29 Lokasi	100%	29 Lokasi	29 Lokasi	100%	PENATAAN RUANG
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	49,88%	67,88%	91,24%	30,88%	33,84%	39,88%	49,38%	99%	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,60	0,57	0,60	0,59	98,33%	0,60	0,58	96,67%	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	90%	58,84%	66,22%	80%	100%	80,00%	69,42%	77,13%	
1	04	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni yang aman dan Terjangkau									
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	cakupan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	100%	89,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Persentase Rumah Layak Huni yang aman dan Terjangkau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan perencanaan kawasan permukiman	100%	14,98%	100%	100%	100%	100%	78,56%	78,56%	
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	luas Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan kabupaten yang ditangani	N/A	19,62%	100%	100%	100%	N/A	19,62%	N/A	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	100%	100%	100%	100%	92,22%	100%	100%	
1 04 06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi Kecil	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
1 05 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)									
		Indeks Ketahanan Daerah									
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	100%	75%	100%	100%	100%	100%	91,91%	91,91%	SATPOL-PP
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana alam tuntas	100%	71,69%	100%	62,06%	62,06%	100%	66,87%	66,87%	BPBD
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap yang ditentukan	80%	81,56%	80%	96,29%	100%	80,00%	88,92%	100%	DINAS DAMKAR
1 06 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial									



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS dan KAT yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	72,16%	100%	100%	100%	75,00%	86,08%	86,08%	DINAS SOSIAL
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	43,44%	100%	40,37%	40,37%	95,00%	41,91%	41,91%	
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang tertangani Yang mandiri	100%	58,37%	63,37%	75,80%	100%	79,10%	67,08%	67,08%	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	82,13%	100%	100%	100%	100%	91,07%	91,07%	
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makan Pahlawan yang terpelihara	100%	75%	100%	100%	100%	100%	87,50%	87,50%	
2	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)									
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktifitas tenaga kerja	30%	24,46%	20%	15,64%	78,20%	25%	45,05%	45,05%	DINAS TENAGA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	30%	28,64%	20,50%	18,28%	89,17%	22%	60,43%	60,43%	KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	22%	80,83%	20,50%	19,13%	93,32%	21%	99,98%	99,98%	
2 08 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)									
2 08 02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Focal Point yang terbentuk di Daerah	90%	29,21%	N/A	N/A	N/A	N/A	29.21%	32,46%	DP2KBP3A
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	90%	1,67%	2,70%	0,03%	1,07%	N/A	1,67%	1,86%	
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	80%	0,33%	100%	100%	100%	N/A	0,33%	0,41%	
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai indikator kabupaten layak anak	650 point	605,05 point	650 point	605,05 point	93,08%	N/A	605,05 point	93,08%	
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	50,00%	25.36%	N/A	N/A	N/A	100,00%	37,68%	75,30%	DINAS KETAPANG
2 09 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan									
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Sarana pada Daerah Rawan Pangan	100%	93.66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2 09 03	Program Peningkatan	Presentase Ketersediaan									



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
		Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat									
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100%	91,09%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani	100%	78,21%	100%	100%	100%	92,07%	92,07%
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	100%	79,31%	100%	100%	100%	92,99%	92,99%
2	10	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pertanahan							
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	96,61%	N/A	N/A	N/A	48,31%	48,31%
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	presentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	41,14%	N/A	N/A	N/A	20,57%	20,57%
2	10	08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Luasan (ha) tanah kosong yang dinventarisasi dan dimanfaatkan	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas tanah yang telah diterbitkan izin	100%	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	100%	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase layanan penatagunaan tanah Dalam kurun waktu tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	11	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup									
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Disusun tepat Waktu, Tepat Proses, Tepat Isi	100%	80,19%	100,00%	98,90%	98,90%	N/A	89,54%	89,54%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	45,86%	100%	96,22%	96,22%	100%	71,91%	71,91%	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	76,26%	100%	92,82%	92,82%	100%	92,47%	92,47%	
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) yang dikendalikan	100%	52,06%	100%	79,89%	79,89%	100%	65,98%	65,98%	
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin lingkungan Dan Perlindungan Dan	Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan lingkungan terhadap izin lingkungan dan IPPLH yang	100%	72,11%	100%	99,77%	99,77%	100%	87,49%	87,49%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	diterbitkan								
2	11 07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase data dan informasi MHA serta Jenis Kearifan Lokal yang di Akui	100%	88,33%	100%	49,78%	49,78%	100%	69,05%	69,05%
2	11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	70,38%	100%	81,49%	81,49%	100%	75,94%	75,94%
2	11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat yang memperoleh Penghargaan Lingkungan Hidup	100%	56,20%	100%	90,68%	90,68%	100%	73,44%	73,44%
2	11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah	100%	70,56%	100%	98,40%	98,40%	100%	84,48%	84,48%
2	11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten	100%	86,97%	100%	95,95%	95,95%	100%	100%	100%
2	12 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	100%	85,75%	100%	84,54%	84,54%	100%	85,21%	85,21%	DISDUKCAPIL
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	100%	99,09%	100%	85,13%	85,13%	100%	92,21%	92,21%	
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat keserasian database yang valid	100%	94,03%	100%	100%	100%	100%	97,12%	97,12%	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Tingkat keserasian database yang valid	100%	85,11%	100%	87,44%	87,44%	100%	86,45%	86,45%	
2	13	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Indeks Desa Membangun									
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan tata Kelola Desa Yang Baik	100%	96,18%	100%	89,00%	89,00%	100%	100%	100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar Desa	100%	90,55%	100%	95%	95%	100%	92,77%	92,77%	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib, Transparan dan Akuntabel	100%	77,84%	100%	98%	98%	100%	95,28%	95,28%	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang Aktif	100%	85,79%	100%	95%	95%	100%	93,89%	93,89%	
2	14	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,16%	0,93%	2,18%	2,18%	100%	2,18%	31,58%	100%	DP2KBP3A
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	64,30%	62,16%	68%	63,40%	93,24%	63,80%	94,48%	100%	
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	N/A	11,63%	11,20%	9,60%	85,71%	9,17%	15,42%	N/A	
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera	22%	32,40%	64,67%	64,22%	99,30%	N/A	48,31%	100%	
2	15	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas									
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat Kelancaran Keamanan dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	100%	90,10%	100%	93,61%	93,61%	100%	96,74%	96,74%	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang laik fungsi	100%	86,26%	100%	96,13%	96,13%	N/A	91,20%	91,20%	
2	16	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)									
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90,40%	94,66%	100%	100%	100%	86,09%	98,50%	98,50%	DKISP
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan kominfo	71,43%	96,89%	100%	98,73%	98,73%	76,79%	100%	100%	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
2	17	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Koperasi									
				Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro									
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20,00%	38,56%	20,00%	27,50%	100%	20%	38,03%	100%	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten	50,79%	59,29%	46,68%	50,00%	100%	49,74%	80,40%	100%	
2	17	04	Program Kesehatan Koperasi	Penilaian KSP/USP Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20,00%	36,09%	20,00%	41,00%	100%	20%	38,55%	100%	
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	37,68%	49,53%	39,68%	15,84%	39,92%	37,68%	32,69%	86,74%	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	78,84%	65,14%	78,84%	55,33%	70,18%	78,84%	60,24%	76,40%	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1,80%	2,50%	1,28%	1,62%	100%	1,80%	1,37%	76,20%	
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	100,00%	0.20%	N/A	N/A	N/A	0,02%	0,10%	0,10%	
2	18	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Banggai									
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Penanaman modal, Perizinan dan non perizinan									
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase peningkatan investasi di Kabupaten Banggai	100%	80,91%	100%	99,60%	99,60%	100%	98,59%	98,59%	DPMPTSP
1	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	210 investor	210 investor	210 investor	210 investor	210 investor	210 investor	210 investor	100%	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	88,50%	100%	100%	100%	100%	94,64%	94,64%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang taat melaporkan LKPM	100%	90,86%	100%	100%	100%	100%	99,92%	99,92%	
2 18 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Pemanfaatan IT untuk Layanan Perizinan dan Non Perizinan	100%	96,74%	100%	100%	100%	100%	98,37%	98,37%	
2 19 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Indeks Kepemudaan									
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100%	81,41%	100%	100%	100%	100%	90,71%	90,71%	
2 19 03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Berstandarisasi	100%	91,58%	100%	68,00%	68,00%	100%	81,29%	81,29%	DINAS DISPORA
2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Jumlah Kegiatan pramuka yang difasilitasi	100%	98,59%	100%	100%	100%	100%	99,29%	99,29%	
2 20 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	96,43%	99,84%	100%	91,50%	91,50%	92,86%	95,67%	95,67%	DINAS KOMINFO
2 21 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	44,34%	80,68%	32,07%	32,07%	100%	41,86%	56,38%	56,38%	DINAS KOMINFO



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
2	22	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Indeks Kebudayaan Daerah									
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah dikembangkan	100%	51,40%	100%	65,14%	65,14%	100%	58,27%	72,84%	DINAS PENDIDIKAN
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	100%	62,89%	100%	73,57%	73,57%	100%	68,23%	68,23%	
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Diinventarisasi dan Dibina	100%	57,66%	100%	86,51%	86,51%	100%	72,09%	72,09%	
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	100%	42,69%	100%	45,25%	45,25%	100%	43,97%	43,97%	
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan Permuseuman yang telah dikembangkan	100%	44,69%	100%	79,48%	79,48%	100%	62,08%	62,08%	
2	23	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat									
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat									
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	100%	81,30%	100%	100%	100%	100%	92,20%	92,20%	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100%	78,13%	100%	100%	100%	100%	89,07%	89,07%	
2	24	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
2 24 02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	100%	68%	100%	100%	100%	100%	84%	84%	DINAS PERPUSTAKAAN
2 24 03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip statis sesuai NSPK	100%	71,35%	N/A	N/A	N/A	100%	71.35%	71.35%	
2 24 04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	100%	3,36%	N/A	N/A	N/A	N/A	3,36%	3,36%	
3 00 00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3 25 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten									
3 25 02	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	27.574 ton	26.215 ton	25.006 ton	28.230 ton	100%	27.574 ton	27.222 ton	98,73%	DINAS PERIKANAN
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	6.572 ton	4.075 ton	5.975 ton	6.578 ton	100%	6.572 ton	5.326,75 ton	81,05%	
3 25 05	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi hasil olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP	34.146,20 ton	19.007 ton	15.861 ton	17.444 ton	100%	34.146,20 ton	18.225,50 ton	53,37%	
3 26 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kontribusi Sektor Parwisata terhadap PDRB									
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan	100%	100%	100%	98,87%	98,87%	20%	87,76%	100%	DINAS PARIWISATA



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Target Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
				wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara									
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Produk Parawisata didalam dan Luar Negeri	100%	75,09%	100%	100%	100%	100%	98,34%	98,34%	
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	80,48%	100%	99,54%	99,54%	100%	100%	100%	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepariwisata dan EKRAF	100%	76,36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	27	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Produktivitas tanaman pangan									
				Produktivitas tanaman hortikultura									
				Produktivitas tanaman perkebunan									
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan									
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase produksi daging	22,41%	75%	6,31%	6,31%	100%	6,31%	44,81%	100%	DINAS PETERNAKAN
				Tingkat pelaksanaan penggunaan sarana pertanian Sayuran, Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Unggul	100%	75%	100%	100%	100%	100%	87,50%	87,50%	DINAS TPHP



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPd Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPd Tahun 2024	Realisasi RKPd Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
				perkebunan									
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana Peternakan yang digunakan	37,50%	83,58%	37,50%	37,50%	100%	45,45%	60,54%	100%	DINAS PETERNAKAN
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian prapanen dan sarana pendukungnya	100%	55,84%	100%	100%	100%	100%	77,92%	77,92%	DINAS TPHP
3	27	04	Program Pengendalian Dan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/ ternak	20%	78,64%	17,15%	17,15%	100,00%	20%	50,39%	100%	DINAS PETERNAKAN
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian	100%	61,35%	100%	100%	100%	100%	80,68%	80,68%	DINAS TPHP
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Jasa Usaha Peternakan	20%	80,78%	20%	20%	100%	20%	56,09%	100%	DINAS PETERNAKAN
				Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian Kabupaten	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	0,18%	0,18%	DINAS TPHP
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Binaan/Peternak	20%	63,13%	20%	20%	100%	20%	44,07%	100%	DINAS PETERNAKAN
				Persentase Pendampingan kepenyuluhan terhadap pelaksanaan intervensi kegiatan pemberdayaan bagi petani	100%	83,61%	100%	100%	100%	100%	91,80%	91,80%	DINAS TPHP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
3 29 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
3 29 05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Presentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang memiliki Izin di Kabupaten	N/A	50%	25%	25%	100%	100%	37,50%	N/A	DINAS PERINDAG
3 30 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kontribusi Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Banggai									
3 30 02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	100%	91,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi yang tertata dan memadai	100%	83,12%	20%	20%	100%	100%	51,56%	51,56%	
3 30 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100%	84,06%	20%	20%	100%	100%	61,03%	61,03%	
3 30 05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Produk yang diekspor	100%	73,16%	20%	37,79%	100%	100%	55,47%	55,47%	
3 30 06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	100%	20%	20%	100,00%	100%	63,16%	63,16%	DINAS DAGRIN
3 30 07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri yang dikonsumsi/ digunakan oleh Masyarakat	100%	13,39%	20%	20%	100%	100%	16,69%	16,69%	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
3	31	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kontribusi IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai									
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase Zona kawasan Industri potensial yang telah direncanakan	100%	75%	100%	100%	100%	100%	87,50%	87,50%	DINAS DAGRIN
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri yang diproses sesuai SOP	100%	75%	20%	20%	100%	100%	47,50%	47,50%	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase industri yang teridentifikasi melalui SIINAS	100%	67%	20%	20%	100%	100%	66%	66%	
3	32	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Presentase Transmigrasi yang Mandiri									
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang direncanakan	30%	100%	100%	100%	100%	25%	50%	100%	DINAS NAKERTRANS
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Dibina Dan Dilatih	30%	67,50%	21%	21%	100%	25%	46,35%	100%	
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	30%	25%			25%	12,50%	41,67%		
4	00	00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01	00	SEKRETARIAT DAERAH										
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	75,54%	100%	95,67%	95,67%	100%	99,10%	99,10%	SEKRETARIA T DAERAH
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi dan koordinasi peningkatan perkeonomian rakyat	99,04%	80,41%	91,00%	92,67%	100%	100%	99,04%	99,04%	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Target Realisasi RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
4	01	04	Program Penataan Administrasi Umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	02	00	SEKRETARIAT DPRD	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD									
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu, tepat tindak lanjut dan tepat sasaran	100%	82,76%	99,04%	78,00%	78,00%	100%	86,88%	86,88%	SEKRETARIA T DPRD
5	00	00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01	00	PERENCANAAN	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah									
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	100%	84,36%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renja PD Mitra Yang Di Susun Tepat Waktu, Tepat Proses Dan Tepat Isi	100%	86,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	02	00	KEUANGAN	Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah									
				Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai									
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu, tepat proses, tepat isi	100%	83,39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPKAD



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Target Realisasi Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
				Persentase Deviasi Proyeksi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain	100%	74,61%	100%	93,68%	93,68%	100%	94,59%	94,59%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang milik Daerah Kab. Banggai yang memiliki Bukti Dokumen kepemilikan	100%	98,38%	100%	100%	100%	94,59%	94,59%	94,59%	BPKAD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	100%	76,97%	100%	87,73%	100%	100%	94,85%	94,85%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	03	00	KEPEGAWAIAN										
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kualitas data, layanan kepegawaian dan kinerja pegawai	87%	80,90%	86,20%	96,25%	100%	89,62%	100%	93,16%	BKPSDM
5	04	00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kompetensi sumber daya aparatur	86%	86%	85%	90%	100%	85%	100%	89,05%	BKPSDM
5	05	00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Indeks Inovasi Daerah									
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang diitindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	100%	78,14%	100%	100%	100%	100%	92,97%	92,97%	BRIDA
6	00	00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6	01	00	INSPEKTORAT DAERAH	Maturitas APIP									



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Target Realisasi Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	100%	100%	100%	94,41%	94,41%	85%	98,51%	98,51%	INSPEKTORAT
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	rata- rata nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	100%	95%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	
7	00	00	UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01	00	KECAMATAN										
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		100%	70%	100%	68,03%	68,03%	100%	69,18%	69,18%	KECAMATAN
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100%	65,50%	100%	94,60%	94,60%	100%	96,77%	96,77%	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100%	64%	100%	66,56%	66,56%	100%	71,53%	71,53%	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	70,75%	100%	88,04%	88,04%	100%	80,87%	80,87%	
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	64%	100%	50%	50%	100%	69,05%	69,05%	
8	00	00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8	01	00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase Masyarakat yang faham dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik									



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Target Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2024	Realisasi RKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2025	
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	73,91%	100%	65,06%	65,06%	100%	72,24%	72,24%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100%	98,32%	100%	99,43%	99,43%	100%	100%	100%	
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kebudayaan dan kemasyarakatan yang aktif	100%	52,20%	100%	66,23%	66,23%	100%	59,21%	59,21%	
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	100%	50,44%	100%	83,40%	83,40%	100%	66,92%	66,92%	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik	100%	70,02%	100%	9,37%	9,37%	100%	40,62%	40,62%	



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2024, target tahun 2024 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2025. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 mengikuti kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan di fokuskan pada upaya peningkatan kapasitas produksi perekonomian menuju transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 di harapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 4-5%. Dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan dari Sektor Industri



Pengolahan, Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Kontruksi serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Terutama dari sektor industri pengolahan yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga menjadi tantangan ke depan, dan ini harus diperhatikan agar tetap terkendali. Skema peran Bank Indonesia juga diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani *secondary market*, terutama untuk SBN.

Searah dengan kebijakan ekonomi nasional diatas, Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2025 lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah baik untuk skala provinsi maupun untuk kabupaten yang masih tertinggal melalui pembangunan kawasan food estate, ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta tetap memperhatikan tindakan lanjutan penanganan covid-19 dan variannya dan keberlanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana 28 September 2018 disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Banggai tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai pada tahun-tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi



3,63 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,42 persen. Peningkatan ekonomi ini disebabkan oleh meningkatnya produksi disebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi. Di perkirakan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai akan terus membaik dan tumbuh positif di kisaran 4-6%. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah yang menunjukkan perbaikan selama tahun 2024 ini. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

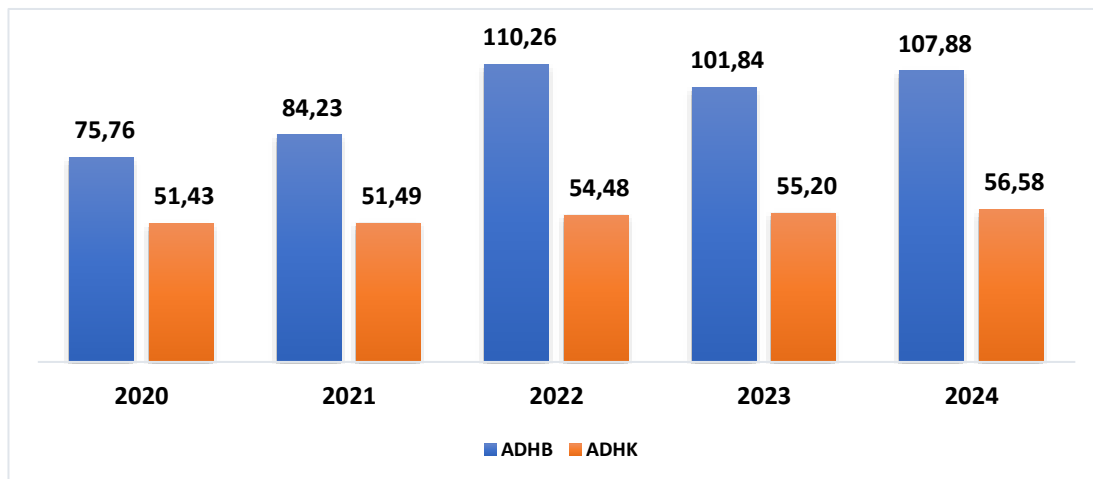
3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2024 a. PDRB dan Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Banggai Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 mencapai 40,74 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 38,06 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB pada kurun waktu 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan, dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 21,38 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,92 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.



Gambar 3.1
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai (Juta Rupiah)
Tahun 2020–2024



Sumber: Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 32,17 persen (angka ini meningkat dari 24,29 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,72 persen (menurun dari 23,38 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,47 persen (menurun dari 22,92 persen di tahun 2020). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing-masing kurang dari 10 persen.



Tabel 3.1
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,38	22,53	18,52	21,61	21,72
2.	Pertambangan dan Penggalian	22,92	22,12	21,61	19,01	18,47
3.	Industri Pengolahan	24,29	26,87	36,42	32,17	32,17
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
6.	Konstruksi	7,87	7,38	5,96	6,92	7,15
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,16	5,07	4,37	5,20	5,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,22	2,14	2,54	2,50
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,32	0,27	0,33	0,34
10.	Informasi dan Komunikasi	2,58	2,60	2,09	2,36	2,36
11.	Jasa Keuangan	1,90	1,96	1,56	1,70	1,75
12.	Real Estate	1,56	1,42	1,18	1,43	1,49
13.	Jasa Perusahaan	0,10	0,09	0,07	0,08	0,08
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,83	3,68	2,88	3,27	3,36
15.	Jasa Pendidikan	2,58	2,43	1,87	2,13	2,17
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,78	0,63	0,74	0,73
17.	Jasa Lainnya	0,50	0,47	0,38	0,44	0,45

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

Besarnya kontribusi Industri Pengolahan di sektor PDRB Kabupaten Banggai ini sebagian besar disokong oleh pengilangan minyak dan gas yang berupa LNG (59,48%) dan industri kimia berupa Amonia (15,39%). Selain itu terdapat industri makanan yang mempunyai kontribusi 10,58 persen terhadap Industri Pengolahan yang sebagian besar berupa industri kopra dan minyak sawit.



Kontributor terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Banggai yaitu Pertambangan dan Penggalan. Sektor ini sebagian besar disokong oleh pertambangan migas yang dilakukan oleh Pertamina Job Tomori. Selain itu subsektor pertambangan bijih logam menjadi penyokong terbesar kedua pada sektor ini. Sub sektor pertambangan bijih logam menyumbang 20,73 persen pada sektor Penggalan dan pertambangan.

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah kategori mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pertambangan dan Penggalan serta Industri Pengolahan peranannya menurun. Salah meningkatnya satu peranan penyebab Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah meningkatnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Penurunan harga sampai 50% pada komoditas Industri Migas dan Industri Kimia juga menjadi pendorong penurunan kontribusi dari kedua sektor tersebut.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan



Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banggai pada periode 2020–2024 dapat dilihat dari tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	10.867,97	11.480,67	12.471,47	13.372,50	14.173,44
Konsumsi LNPR	462,53	491,56	567,34	649,68	741,60
Konsumsi Pemerintah	2,877,06	3.111,22	3.212,15	3.337,94	3.691,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.356,92	7.924,07	8.408,11	9.179,13	10.221,83
Perubahan Inventori	199,67	217,57	238,07	231,95	381,32
Net Ekspor Barang dan Jasa	35.525,77	32.063,33	52.181,39	46.798,92	51.877,35
PDRB	27.360,88	30.825,09	40.776,13	38.057,96	40.737,03

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai pada periode 2020–2024 dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut ini:



Tabel 3.3
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut
Pengeluaran Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah Tangga	6.460,07	6.632,83	6.903,15	7.186,67	7.487,25
Konsumsi LNPRT	274,57	277,88	304,12	328,04	367,96
Konsumsi Pemerintah	1.442,46	1.503,06	1.515,17	1.525,02	1.676,36
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.323,07	4.507,51	4.646,07	4.699,26	4.876,03
Perubahan Inventori	137,50	145,25	151,13	134,22	220,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	30.755,82	24.910,23	33.984,02	32.168,53	39.244,99
PDRB	18.517,22	18.840,59	20.139,75	20.627,67	21.376,37

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2025

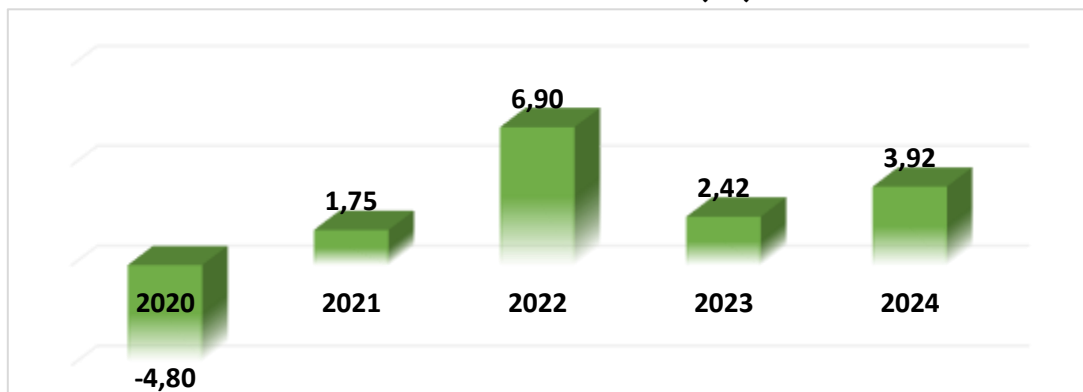
b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 21,38 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari tahun 2023 yang sebesar 20,63 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,92 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 2,42 persen.



Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai mengalami penurunan menjadi -4,80 persen, yang utamanya diakibatkan karena dampak pandemi COVID-19. Berlanjut pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 1,75 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat drastis menjadi 6,90 persen, kemudian di tahun 2023 melambat menjadi 2,42 persen dan meningkat menjadi 3,92 pada tahun 2024.

Struktur laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Banggai menurut lapangan Usaha tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2020-2024

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,66	3,58	1,55	3,47	0,18
2	Pertambangan dan Penggalian	1,36	-0,44	9,99	1,14	6,00
3	Industri Pengolahan	-10,77	-2,35	11,83	0,72	2,52



No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
4.	Pengadaan Listrik, Gas	5,09	3,68	10,00	6,69	5,25
5.	Pengadaan Air	4,21	6,01	3,30	3,04	4,00
6.	Konstruksi	-13,16	3,80	1,83	2,99	2,84
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-6,23	9,10	8,18	7,16	3,44
8.	Transportasi dan Pergudangan	-33,90	10,92	14,54	5,59	3,37
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-14,53	15,13	10,01	8,25	6,18
10.	Informasi dan Komunikasi	7,73	11,83	6,08	5,72	6,06
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,10	9,83	-3,68	0,37	9,72
12.	Real Estate	0,03	1,33	7,24	5,72	5,71
13.	Jasa Perusahaan	-1,82	3,60	5,42	4,95	2,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77	5,96	0,02	2,58	6,51
15.	Jasa Pendidikan	-2,77	5,61	0,22	4,88	6,67
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,64	3,01	2,90	6,66	4,38
17.	Jasa Lainnya	-0,01	6,05	4,39	5,27	6,02
P D R B		-4,80	1,75	6,90	2,42	3,92

Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

c. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19 dan pada tahun 2023 disebabkan terjadinya penurunan produksi.

Migas dan Amonia yang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Banggai. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 75.679 ribu rupiah kemudian naik di tahun 2021 menjadi 84.300 ribu rupiah, dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 110.262 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh faktor inflasi. Kemudian Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 101.841 ribu rupiah dikarenakan turunnya harga Migas dan Amonia yang menjadi komoditas utama. PDRB per kapita



Kabupaten Banggai pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 107.884 ribu rupiah.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan, kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Banggai tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 2,56 persen dari tahun 2023.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku Gambaran perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2020-2024, dapat di lihat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

Tahun/Year	2020	2021	2022	2023*	2024**
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)					
- ADHB/ at current price	27,361	30,825	40,766	38,057	40,737
- ADHK/ at 2010 Constant Price	18,517	18,841	20,140	20,627	21,376
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	75,679	84,300	110,262	101,841	107,884
- ADHK/ at 2010 Constant Price	51,218	51,525	54,744	55,198	56,610
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	-0.78	0.60	5.72	1.31	2.56
Jumlah Penduduk (Ribu Orang) / Population (Thousand People)	361.54	365.66	369.72	373.69	377.60
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	-4.05	1.14	1.11	1.07	1.05

Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025

d. Inflasi

Angka inflasi merupakan tolak ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada bulan Juni 2025 inflasi *year on year* (*y-on-y*) Luwuk sebesar 4,00 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,25.

Inflasi *y-on-y* pada Juni 2025 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,18



persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,96 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,24 persen; kelompok transportasi sebesar 2,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,93 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,73 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,00 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,98 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks harga, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen.

Tingkat inflasi *month to month* (*m-to-m*) dan tingkat inflasi *year to date* (*y-to-d*) Luwuk bulan Juni 2025 masing-masing sebesar 0,02 persen, dan 3,11 persen.

Gambar 3.3
Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024



e. Tingkat Kemiskinan

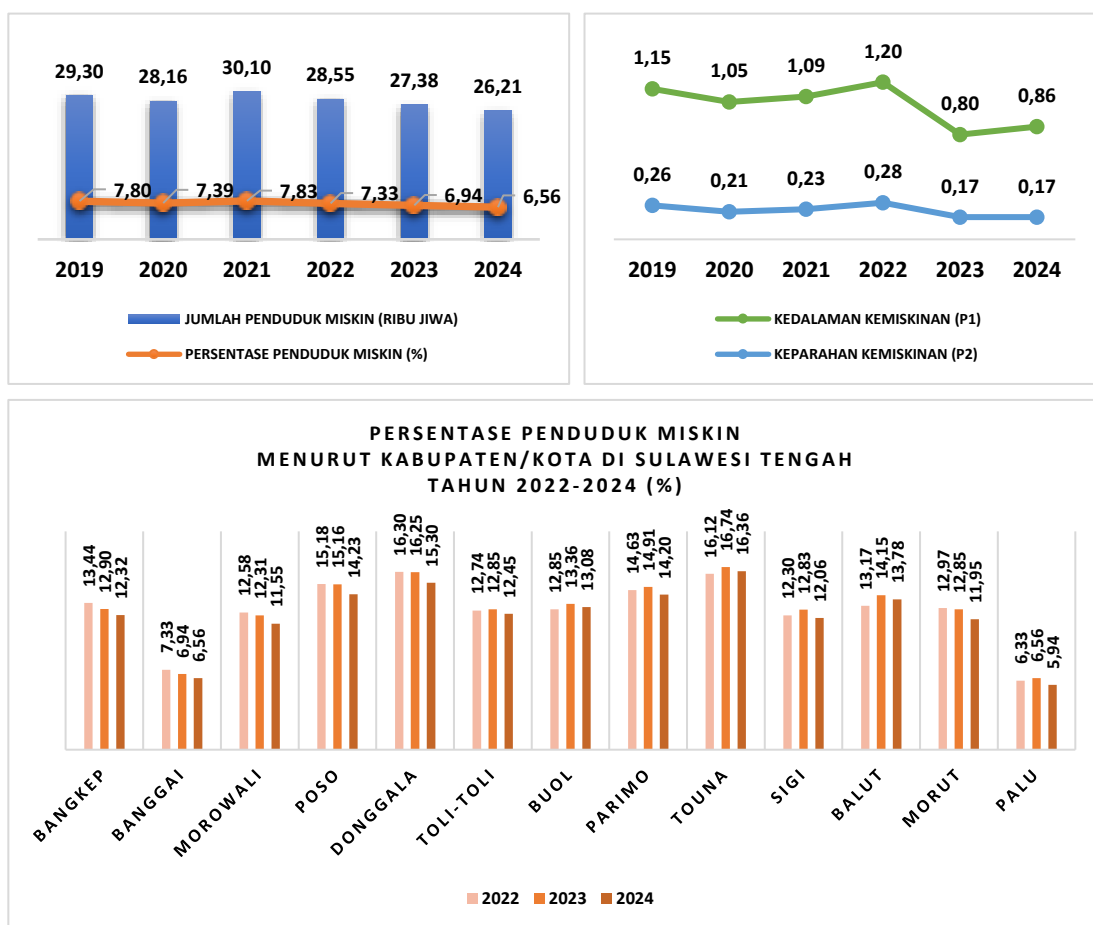
Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan disuatu daerah.

Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Banggai.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Banggai pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup fluktuaktif. Angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 7,80% atau 29,30 ribu jiwa, di tahun 2020 turun menjadi 7,39% atau 28,16 ribu jiwa, di tahun 2021 kemiskinan kabupaten Banggai meningkat menjadi 7,83% atau 30,10 ribu jiwa dan terus menurun di tahun 2022 menjadi 7,33% atau 28,55 ribu jiwa, di tahun 2023 menjadi 6,94% atau 27,38 ribu jiwa dan di tahun 2024 turun menjadi 6,56 atau 26,21 ribu jiwa. Kabupaten Banggai merupakan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Tengah yang mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen.



Gambar 3.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019–2024

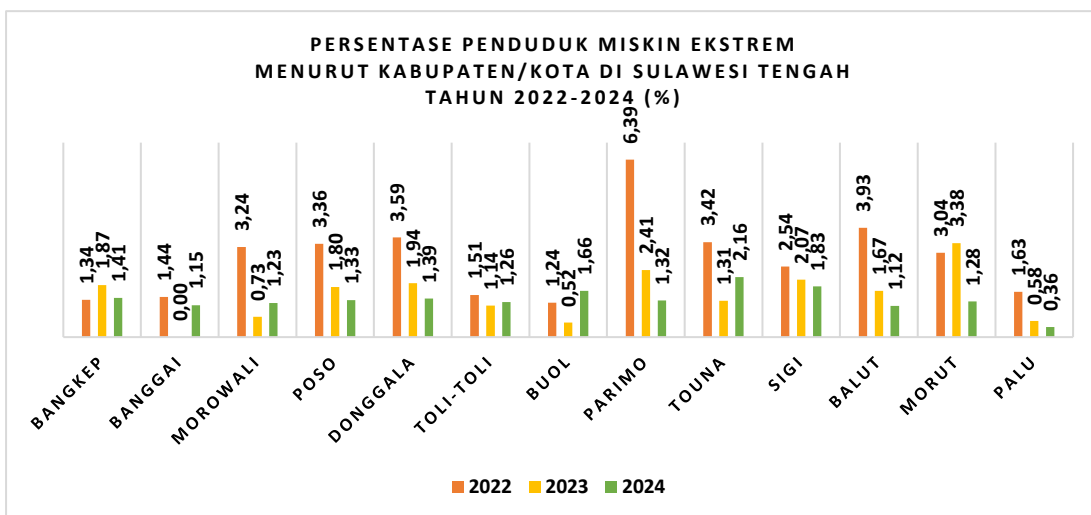
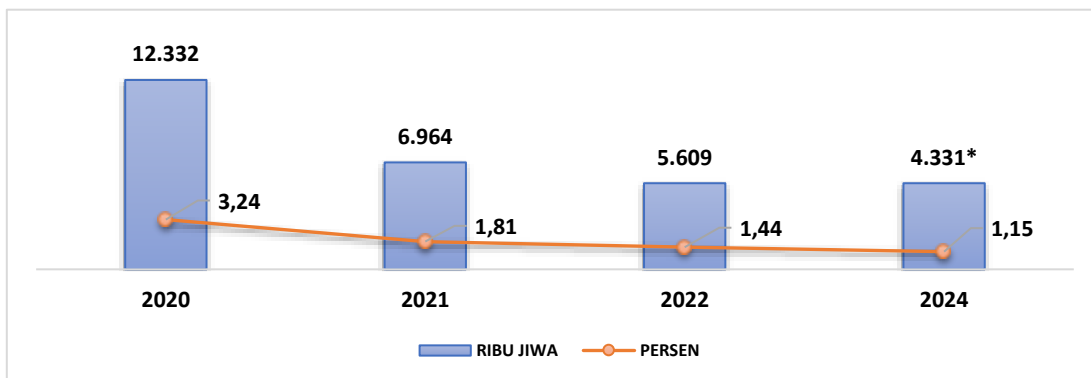


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

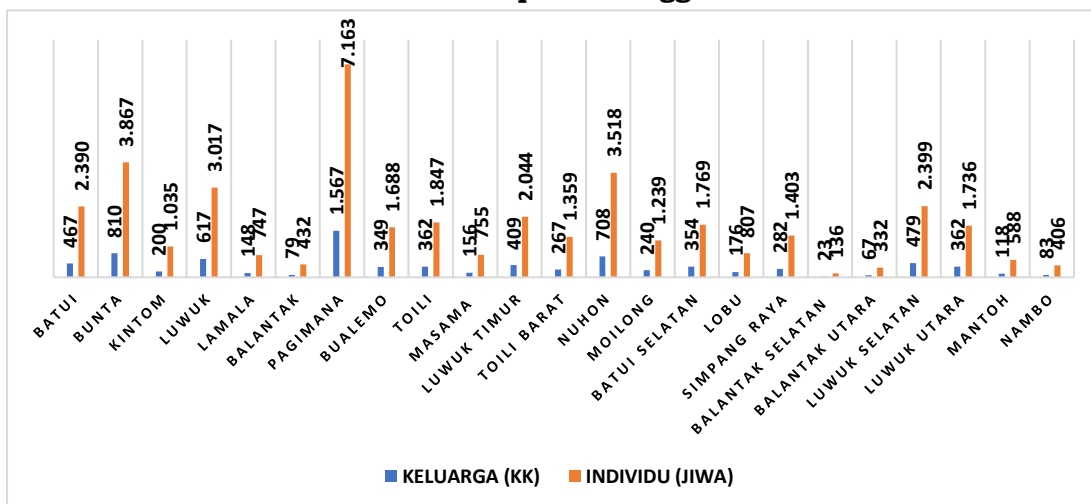
Selanjutnya jumlah penduduk miskin ekstrem dari 6.964 Jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.609 Jiwa tahun 2022, kemudian turun menjadi 4.331 Jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan data P3KE 2021, Keluarga dan Individu Miskin Desil 1 tertinggi berada di Kecamatan Pagimana sejumlah 1.374 KK atau 6.474 jiwa.



Gambar 3.5
Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai
Tahun 2020 – 2024



Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) keluarga Dan
Individu Desil 1 Kabupaten Banggai Tahun 2023



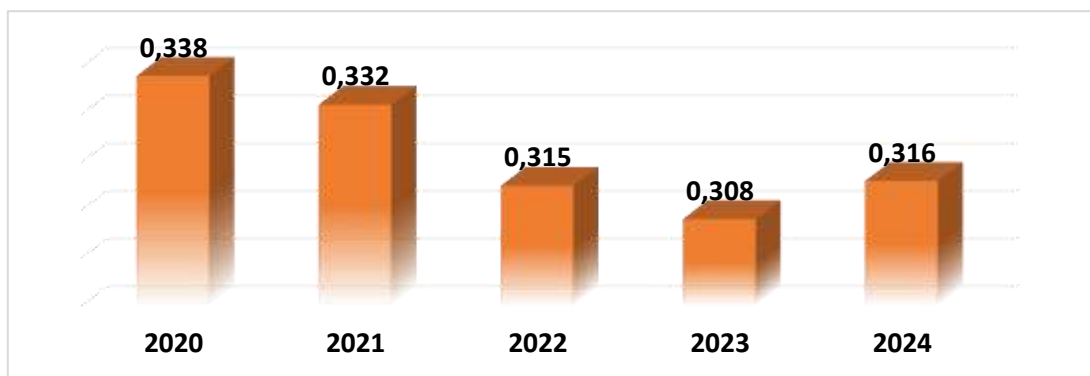
Sumber: Kemenko PMK, P3KE, diolah Bappeda Kab. Banggai, 2024



f. Gini Rasio

Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2023 kembali menurun seiring dengan berkurangnya angka kemiskinan yaitu menjadi sebesar 0,308 point dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,315 point.

Gambar 3.6
Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (data di olah)

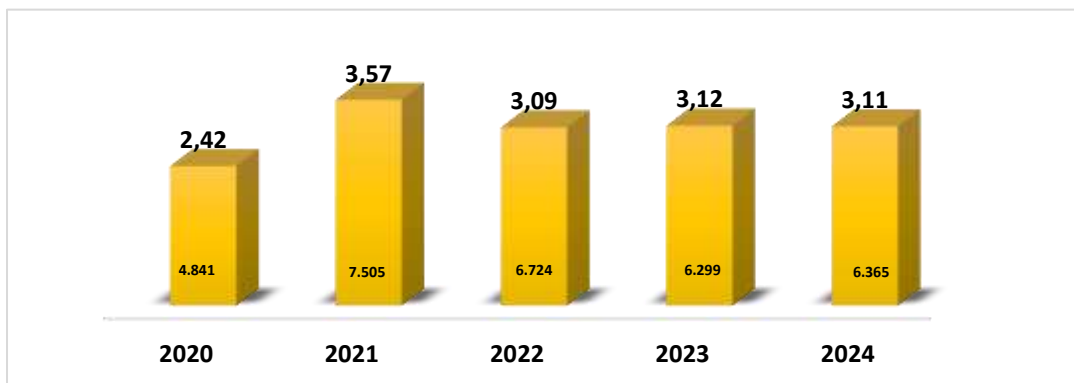
g. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2024 menurun sebesar 0,01 persen yaitu 3,11 persen di bandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,12 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,93 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 sebesar 71,70 persen, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 204.604 orang.



Gambar 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai
Tahun 2020–2024

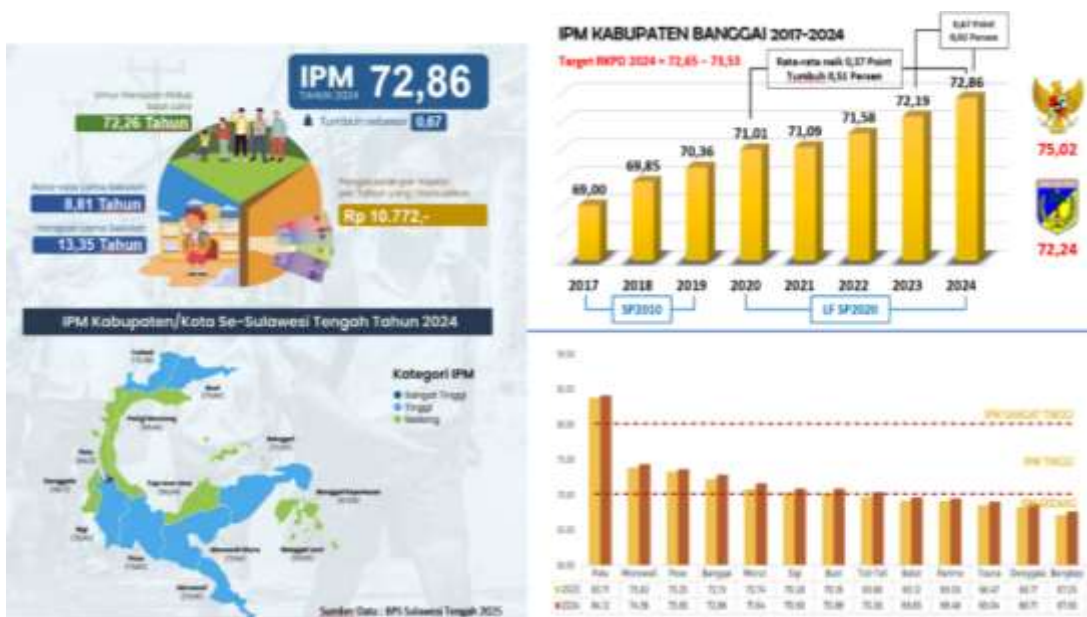


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2017–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka IPM Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu 72,86 Poin dengan Kategori **“Tinggi”**.

Gambar 3.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai
Tahun 2017–2024



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024



3.1.1.2 Perkiraan Tahun 2024

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana di uraikan di atas, dan mencermati perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, maka perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Banggai Tahun 2024 dapat digambarkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di harapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 7,0-8,0%, hal ini didorong oleh meningkatnya perkembangan sektor industri dan pengolahan, pertambangan dan penggalan, pariwisata, konstruksi, pertanian dan perikanan.
2. Inflasi diperkirakan akan tetap stabil dan terkendali dengan rata-rata sebesar 3-4% per tahun, walaupun terdapat beberapa faktor yang berpengaruh seperti harga bahan makanan atau perubahan nilai tukar mata uang.
3. Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran terus memperlihatkan trend peningkatan. Pencabutan status pandemic covid 19 oleh presiden memberikan optimisme, keyakinan, kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya. Kondisi ini di harapkan dapat berdampak terhadap meningkatnya kembali pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di maksud.
4. Tingkat kemiskinan di perkirakan akan menurun, begitu juga dengan Tingkat pengangguran terbuka akibat adanya aktivitas ekonomi yang telah berjalan baik serta kebijakan pemerintah melalui upaya pemulihan ekonomi



dan stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya di perluas sebagai bentuk *social safety net*, angka kemiskinan dan pengangguran dapat tetap di jaga sesuai yang di targetkan.

5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di harapkan berdampak pada IPM, utamanya pada komponen pengeluaran perkapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Diperkirakan pendapatan masyarakat terus membaik, sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan asumsi – asumsi diatas, di proyeksikan perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Proyeksi Perubahan Indikator Makro
Kabupaten Banggai Tahun 2025

NO.	Indikator Ekonomi	Capaian 2024	Target RKPD Banggai 2025	Target Provinsi Untuk Banggai 2025	Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,63	4,61 – 5,00	9,00 – 12,50	4,61 – 5,00
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,11	2,88 – 3,00	2,88 – 3,00	2,88 - 3,00
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,56	6,00 – 6,18	6,51	6,00 – 6,51
4.	Indeks Gini Rasio (Poin)	0,316	0,268 – 0,280	0,268	0,268 – 0,300
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,86	72,30 – 72,50	72,30 – 72,50	72,86 – 73,50
6.	Inflasi (%)	2,75	3,00 – 4,00	3,25	2,00 – 4,00



3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Arah Kebijakan Keuangan daerah, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dioperasionalkan di dalam APBD. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan agar seluruh sumber keuangan yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden kedalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, maka disepakati perubahan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 yaitu: ***“Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Mendasari permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah tahun 2025, tema pembangunan daerah, serta memperhatikan kriteria penentuan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta Prioritas Nasional (PN) dalam Narasi Rancangan RKP tahun 2025 dan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, maka di tetapkan 8 (Delapan) Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Unggul, Berbudaya Dan Berdaya Saing.
2. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Menuju Banggai Swasembada Pangan.
3. Mengembangkan Sarana Prasarana Konektivitas, Pelayanan Dasar, Tik Dan Transformasi Digital.
4. Pembangunan Wilayah Dan Desa Yang Merata Dan Berkeadilan.



5. Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi Dan Mitigasi Bencana.
6. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal Dan Pemanfaatan Teknologi.
7. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Pertambangan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Kapasitas Fiskal Daerah.
8. Penguatan Reformasi Birokrasi

Pada perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025, kebijakan keuangan daerah mengacu pada kondisi sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi tahun berjalan atas implementasi kebijakan keuangan daerah yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 sampai dengan pelaksanaan hingga Triwulan I Tahun 2025;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan Instruksi Presiden ini antara lain :
 - a. Membatasi jumlah belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion;
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan



- tidak memiliki output yang terukur;
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga;
 - g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber transfer ke Daerah.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Dalam Surat Edaran ini Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita kedalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA. 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :
- a. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;



- f. Dukungan swasembada pangan;
 - g. Pengembangan Industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Dalam Surat Edaran ini Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD TA. 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion;
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh Perangkat Daerah;
 - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
 - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik



dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga; dan

- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Selanjutnya hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk digunakan bidang pendidikan; bidang kesehatan; infrastruktur dan sanitasi; optimalisasi penanganan pengendalian inflasi; stabilitas harga makanan dan minuman; penyediaan cadangan pangan; dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

- 5. Keadaan Darurat; dan
- 6. Keadaan Luar Biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis terhadap realisasi APBD TA 2024, proyeksi RKPD Tahun 2025, Penetapan APBD TA 2025, maka di proyeksikan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2025 (Rupiah)

KODE AKUN	U R A I A N	RKPD TAHUN 2025	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.153.074.256.040,-	3.071.243.768.275,-	2.942.249.715.688,-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	288.503.902.299,-	294.503.902.299,-	294.503.902.299,-
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	133.118.188.864,-	138.118.188.864,-	138.118.188.864,-
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	27.915.711.026,-	27.915.711.026,-	27.915.711.026,-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,-	5.714.244.284,-	5.714.244.284,-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.755.758.125,-	121.755.758.125,-	122.755.758.125,-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.837.209.912.553,-	2.751.894.937.788,-	2.622.900.931.201,-



KODE AKUN	U R A I A N	RKPD TAHUN 2025	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.793.236.716.798,-	2.685,101.874.000,-	2.510.706.542.000,-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.973.195.755,-	66.793.109.788,-	112.194.389.201,-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.360.441.188,-	24.844.882.188,-	24.844.882.188,-
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.515.559.000,-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	24.844.882.188,-	24.844.882.188,-	24.844.882.188,-
5	BELANJA	3.192.879.256.040,-	3.256.416.085.349,-	3.316.105.440.115,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.104.850.889.510,-	2.226.206.802.207,97,-	2.289.623.403.190,47
5.1.01	Belanja Pegawai	1.062.782.767.933,-	1.122.468.605.946,-	1.189.111.399.139,36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.238.399.698,-	1.049.701.895.008,77	1.039.072.203.168,91
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,-	404.000.000,-	404.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	51.932.559.157,-	53.632.301.248,20	61.035.800.882,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	493.162.722,-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	668.832.475.125,-	609.922.599.056,03	605.316.670.834,53
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.350.000.000,-	14.556.938.926,35	14.982.789.477,71
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.883.898.986,-	85.793.426.149,00	111.253.745.259,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.689.907.546,-	219.353.942.129,07	201.366.430.212,40
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	304.908.668.593,-	289.313.150.851,61	276.858.564.885,42
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	545.141.000,-	545.141.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	360.000.000,-	310.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.284.301.600,-	10.284.301.600,-	11.162.983.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,-	10.284.301.600,-	11.162.983.600,00
5.4	BELANJA TRANSFER	408.911.589.805,-	410.002.382.490,-	410.002.382.490,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.345.058.805,-	16.603.389.990,-	16.603.389.990,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	394.566.531.000,-	393.398.992.500,-	393.398.992.500,00
	SURPLUS / DEFISIT	(39.805.000.000,00)	(185.172.317.074,00)	(373.855.724.427,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	39.805.000.000,-	185.172.317.074,00	377.655.724.427,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.605.000.000,-	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.605.000.000,-	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.800.000.000,-	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	3.800.000.000,-	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,-	-	-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan		0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara total pendapatan daerah berkurang sebesar Rp128.994.052.587,00 yaitu pada pendapatan transfer,



semula Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp3.071.243.768.275,00, dengan berkurangnya Pendapatan Daerah tersebut sehingga pada Perubahan RKPD ini menjadi sebesar Rp2.942.249.715.688,00. Kemudian belanja daerah yang direncanakan pada Perubahan RKPD sebesar Rp3.316.105.440.115,02, dari total belanja semula pada penetapan RKPD sebesar Rp 3.256.416.085.349,00, bertambah sebesar Rp 59.689.354.766,02. Sementara Pembiayaan Daerah pada penetapan RKPD sebesar Rp 185.172.317.074,00, bertambah sebesar Rp188.683.407.353,02, sehingga pada perubahan RKPD menjadi sebesar Rp 373.855.724.427,00.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pada pendapatan daerah Kabupaten Banggai terdapat penyesuaian anggaran pada Perubahan Atas APBD 2025, sehingga perubahan tersebut sebagai berikut :



Tabel 3.8
Pendapatan Daerah dan Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	3.153.074.256.040,00	3.071.243.768.275,00	2.942.249.715.688,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	288.503.902.299,00	294.503.902.299,00	294.503.902.299,00
4.1.01	Pajak Daerah	133.118.188.864,00	138.118.188.864,00	138.118.188.864,00
4.1.02	Retribusi Daerah	27.915.711.026,00	27.915.711.026,00	27.915.711.026,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	5.714.244.284,00	5.714.244.284,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	121.755.758.125,00	122.755.758.125,00	122.755.758.125,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.837.209.912.553,00	2.751.894.983.788,00	2.622.900.931.201,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.793.236.716.798,00	2.685.101.874.000,00	2.510.706.542.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.973.195.755,00	66.793.109.788,00	112.194.389.201,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.360.441.188,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.515.559.000,00	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2025

Dalam tabel 3.8 tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2025, Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai diproyeksikan sebesar Rp3.153.074.256.040,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp288.503.902.299,00;
2. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp2.105.350.162.399,00, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp27.360.441.188,00.



Sementara itu dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3.071.243.768.275,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp294.503.902.299,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.751.894.983.788,00;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp24.844.882.188,00.

Kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp2.942.249.715.688,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp294.503.902.299,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.622.900.931.201,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp24.844.882.188,00.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai pembangunan daerah pada tahun 2025 beserta dinamika yang terjadi dalam tahun berjalan. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 yang secara struktur anggaran mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer tersebut mengalami penurunan, namun ada penambahan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, yaitu :

1. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk



- menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Penyesuaian atas Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH-KB) mendasari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Penyesuaian Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.14.3/27/Bapenda-G.ST/2025 tentang Penetapan Besaran target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025;
 5. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.14.3/28/Bappeda-G.ST/2025 tentang Penetapan Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024



6. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.3/075/BPKAD-G.ST/2025 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek meliputi :

- a. Pajak Daerah yaitu :

- 1) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak
- 2) Mengembangkan layanan pajak online untuk mempermudah pembayaran pajak

- b. Retribusi daerah yaitu Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD.

- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan PD terkait terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan obyek lainnya.



- 2) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro
 - e. Untuk optimalisasi PAD, Pemerintah Kabupaten Banggai telah mempunyai SDM yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan pemungutan PAD sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah telah rutin mengadakan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan untuk mengetahui realisasi capaian pendapatan setiap bulan.
2. Pendapatan Transfer
- Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Terhadap pendapatan transfer ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah jenis penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi



daerah, bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dana perimbangan. Sumber pendapatan ini bisa berasal dari berbagai macam penerimaan yang tidak terklasifikasi dalam kategori utama lainnya, seperti pendapatan dari penjualan atau sewa asset daerah yang tidak digunakan. Pendapatan ini juga berasal dari sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memperluas basis pendapatan daerah sehingga dapat lebih fleksibel dalam membiayai kebutuhan Pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan perubahan-perubahan arah kebijakan tersebut di atas, perubahan target pendapatan daerah dimaksud yaitu pada komponen Pendapatan Transfer (komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat), dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pengurangan target yang semula sebesar Rp944.475.847.000,00 menjadi sebesar Rp918.990.879.000,00, berkurang sebesar Rp25.484.968.000,00. Penyesuaian tersebut pada Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum;
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah sebesar Rp1.089.636.000,00 dari target semula sebesar Rp238.240.036,00 sehingga menjadi sebesar Rp239.329.672.000,00. Penyesuaian target anggaran dimaksud yaitu penambahan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025) yaitu penyesuaian operasional penyuluh.



3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD setidaknya berfokus pada: i) pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending), seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; ii) likuiditas Keuangan Daerah; iii) SiLPA; serta iv) pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian output atas program-program prioritas nasional dan daerah. Arah perubahan kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 antara lain :

1. Pemenuhan Belanja Urusan Wajib. Selain itu, kebijakan keuangan akan difokuskan pada pemenuhan belanja urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pembiayaan urusan pilihan yang menjadi pendukung utama visi misi Kepala Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala kebutuhan dasar masyarakat tercukupi dengan baik.
2. Penyesuaian Belanja Operasi, Belanja Modal serta Belanja Tidak Terduga berkaitan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Edaran yang telah diterbitkan.
3. Optimalisasi Program Berorientasi Masyarakat. Salah satu fokus kebijakan keuangan adalah pada optimalisasi program-program yang berorientasi pada masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Anggaran. Kebijakan keuangan akan menasar pada peningkatan kualitas anggaran daerah dengan menggunakan pola penganggaran yang berbasis kinerja dan pendekatan tematik pembangunan disertai sistem pelaporan akuntabel. Hal ini bertujuan



untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.

5. Penggunaan Anggaran Berbasis Prioritas Pembangunan. Untuk tahun 2025, anggaran belanja daerah akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, utamanya peningkatan kualitas jalan, pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, dan penurunan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan



pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025, meliputi :

- 1) Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- 2) Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;
- 3) Alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar Perangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- 4) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan



program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas;

- 5) Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Perkuatan pendanaan prioritas Tahun 2025 mencakup penyelesaian janji politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai sesuai dengan visi misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026; Perluasan dan permasalahan program Satu Juta Satu Pekarangan, Satu Bumdes 500 Juta dan Banggai Terang; Kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit dan berdampak luas/langsung ke masyarakat, terutama untuk penanggulangan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, kualitas pelayanan publik dan pengendalian inflasi daerah (kegiatan non prioritas yang tidak berdampak langsung ke masyarakat akan di minimalisir); penyelesaian target RPJMD Banggai 2025; serta pelimpahan kewenangan kepada Camat.

Kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang di tetapkan dalam perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 adalah menyesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan I dan penyesuaian belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan sebagai konsekuensi adanya penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan.



Perubahan kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mendasari perubahan-perubahan kebijakan tersebut diatas, dan sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; maka Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan efisiensi belanja, yang antara lain :

1. Mengurangi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp 3.853.958.000,00 untuk dialihkan ke Belanja Hibah KPU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipergunakan untuk Pemilihan Suara Ulang Pilkada Banggai Tahun 2024 sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/1539/SJ perihal Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD Tahun Anggaran 2025 ;
2. Efisiensi DAU Infrastruktur yang telah dijabarkan dalam Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 25.484.968.000,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Penyesuaian



Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu penyesuaian pada Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum.

Selain efisiensi belanja, Silpa non earmark juga dialokasikan antara lain untuk mengakomodir percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan pada tanggal 12 Juli 2025 sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penyesuaian belanja lainnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa).

Berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagaimana di atas, proyeksi total belanja perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp3.316.105.440.115,02 bertambah sebesar Rp59.689.354.766,00 dari belanja daerah pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.256.416.085.349,00. Secara rinci perubahan rencana target belanja daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Belanja Daerah dan Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2025

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
5	BELANJA DAERAH	3.192.879.256.040,00	3.256.416.085.349,00	3.316.105.440.115,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.104.850.889.510,00	2.226.206.802.202,97	2.289.623.403.190,47
5.1.01	Belanja Pegawai	1.062.782.767.933,00	1.122.468.605.946,00	1.189.111.399.139,36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.238.399.698,00	1.049.701.895.008,77	1.039.072.203.168,91
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	51.932.559.157,00	53.632.301.248,20	61.035.800.882,20



KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	493.162.722,00	-	-
5.2	BELANJA MODAL	668.832.475.125,00	609.922.599.056,03	605.316.670.834,53
5.2.01	Belanja Modal tanah	1.350.000.000,00	14.556.938.926,35	14.982.789.477,71
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesian	132.883.898.986,00	85.793.426.149,00	111.253.745.259,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.689.907.546,00	219.353.942.129,07	201.366.430.212,40
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	304.908.668.593,00	289.313.150.851,61	276.858.564.885,42
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	545.141.000,00	545.141.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	360.000.000,00	310.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.284.301.600,00	10.284.301.600,00	11.162.983.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,00	10.284.301.600,00	11.162.983.600,00
5.4	BELANJA TRANSFER	408.911.589.805,00	410.002.382.490,00	410.002.382.490,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.345.058.805,00	16.603.389.990,00	16.603.389.990,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	394.566.531.000,00	393.398.992.500,00	393.398.992.500,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2025

Dalam tabel tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2025, Belanja Daerah Kabupaten Banggai diproyeksikan sebesar Rp3.192.879.256.400,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp2.104.850.889.510,00;
2. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp668.832.475.125,00;
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp10.284.301.600,00; dan
4. Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp408.911.589.805,00.

Sementara itu dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp3.256.416.085.349,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp2.226.206.802.202,97;
2. Belanja Modal sebesar Rp609.922.599.056,03;



3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.284.301.600,00;
4. Belanja Transfer sebesar Rp410.002.382.490,00.

Kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp3.316.105.440.115,02, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp2.289.623.403.190,47;
2. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp605.316.670.834,53;
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp11.162.983.600,00; dan
4. Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp410.002.382.490,00.

Apabila didasarkan pada data perubahan tabel belanja tahun 2025 di atas maka dapat dilihat bahwasanya perubahan kebijakan atas belanja daerah tersebut terjadi pada belanja modal. Penurunan alokasi Belanja Modal tersebut terjadi pada belanja modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp17.987.511.916,67 serta Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi berkurang sebesar Rp12.454.585.966,19. Sementara untuk Belanja Operasi secara total bertambah sebesar Rp63.416.600.987,50, namun untuk Belanja Barang dan Jasa mengalami pengurangan sebesar Rp10.629.691.839,86.

Perubahan kebijakan belanja daerah dimaksud antara lain diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti dinamika kebutuhan masyarakat atau strategi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan alokasi belanja operasi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan



meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Untuk dapat mencapai hal tersebut, beberapa inovasi strategi yang bisa dilakukan antara lain seperti peningkatan efisiensi pengelolaan belanja operasi, misalnya dengan melakukan audit dan evaluasi secara berkala, mengurangi penggunaan barang atau jasa yang tidak efektif, atau melakukan restrukturisasi organisasi agar lebih efisien. Selain itu juga mendorong adanya kolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga non-pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur atau program-program lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan melakukan inovasi strategi tersebut, diharapkan belanja operasi daerah dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup segala penerimaan yang harus dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun dalam periode tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Adapun komposisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, penerimaan pembiayaan terbesar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Dari segi pengeluaran pembiayaan, penyertaan



modal (investasi) daerah memiliki porsi yang signifikan dibandingkan dengan komponen lainnya, diikuti oleh transfer dari Dana Cadangan Daerah (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Banggai Tahun 2025 diperoleh dari SILPA dan diarahkan untuk penempatan modal/penyertaan modal bagi badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.10
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 (Rupiah)

KODE AKUN	U R A I A N	RKPD TAHUN 2025	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN APBD 2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH	39.805.000.000,-	185.172.317.074,-	373.855.724.427,02
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.605.000.000,-	188.972.317.074,-	377.655.724.427,02
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.605.000.000,-	188.972.317.074,-	377.655.724.427,02-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.800.000.000,-	3.800.000.000,-	3.800.000.000,-
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	3.800.000.000,-	3.800.000.000,-	3.800.000.000,-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,-	-	-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan		0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai, 2025

Dalam tabel tersebut diatas, pada RKPD Tahun 2025, Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai diproyeksikan sebesar Rp39.805.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp44.605.000.000,00;
2. Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp4.800.000,00;

Sementara itu dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, Pembiayaan Daerah ditetapkan dan diproyeksikan sama dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp185.172.317.074,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp188.972.317.074,00;
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 3.800.000.000,00;

Kemudian pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar



Rp373.855.724.427,02, bertambah sebesar
Rp 188.683.407.353,02 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) diproyeksikan sebesar Rp 377.655.724.427,02;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp 3.800.000.000,00.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 di lakukan antara lain untuk penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 serta guna mensinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih untuk periode 2025–2030 baru saja di lantik pada tanggal 2 Juni 2025, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 telah di lakukan penyelarasan dengan Visi dan Misi serta **NAWAITU** (9 Program Terbaik Cepat (quickwins), 9 Program Unggulan Kreatif dan Inovatif serta 9 Program Aksi) dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih, yang juga telah di jabarkan dalam Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029.

4.1 Perubahan Kebijakan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Visi Presiden RI periode 2025-2029 yaitu "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.



Gambar 4.1
Visi dan Misi Presiden RI Periode 2025–2029



Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.



Gambar 4.2
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil
Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Prioritas Pembangunan nasional tahun 2025 merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup Langkah-Langkah strategis untuk mencapai keberhasilan Pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah sebagaimana gambar 4.3 berikut :



Gambar 4.3
Asta Cita Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

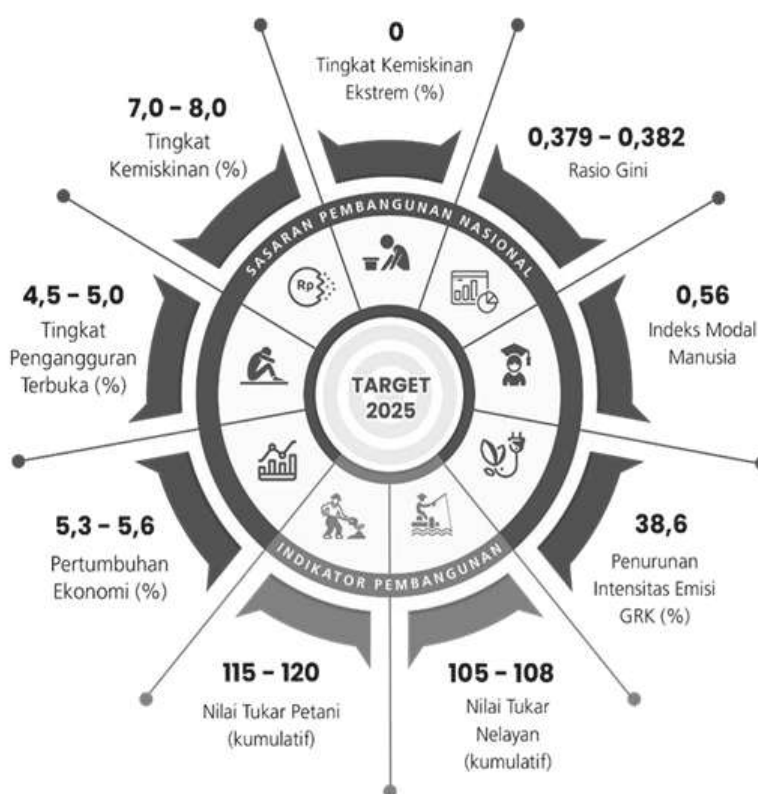
- | | |
|--|--|
| <p>PRIORITAS NASIONAL 1</p> <p>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 5</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p> |
| <p>PRIORITAS NASIONAL 2</p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 6</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p> |
| <p>PRIORITAS NASIONAL 3</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 7</p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p> |
| <p>PRIORITAS NASIONAL 4</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p> | <p>PRIORITAS NASIONAL 8</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> |

Tema RKP Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Sedangkan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan



Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:

Gambar 4.4
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



4.2 Perubahan Kebijakan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu ***"Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju Dan Berkelanjutan Tahun 2025-2029"***, yang kemudian di jabarkan menjadi 4 misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sehat, cerdas dan Sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja



2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi keunggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi dan kerakyatan yang berkeadilan
3. Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang berkelanjutan yang berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor
4. Meningkatkan tatakelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif, serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai yang religius dan kearifan lokal.

Tema Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah **“Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”** atau **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Ditunjang Oleh SDM yang Berdaya Saing”**.

Untuk menjalankan program dalam rangka mengatasi permasalahan dan isu sebagai berikut:

1. **Berani Cerdas**, dengan Program Unggulan Nambaso (Anak bisa Sekolah Gratis, Pemberian BOSDA, Biaya Uji Kompetensi, Biaya Prakerin, Kuliah Gratis, Beasiswa Kuliah S1 bagi Mahasiswa berprestasi dan Guru dan ASN di Dalam dan Luar Negeri, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK berbasis Digital, Pelatihan Vokasional Siap Kerja bagi Milenial Gen-Z, Sulteng Career Center
2. **Berani Sehat** dengan Program Unggulan Integrasi layanan Kesehatan Bersama BPJS, berobat Gratis Menggunakan KTP, Penanganan Stunting, Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Peningkatan



kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit, Mendorong RS. Undata dan Madani menjadi RS Rujukan Bertaraf Internasional, Jaminan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Naseha Kami), Integrasi Layanan Kesehatan dengan Rumah Sakit Lainnya

3. **Berani Sejahtera**, dengan Program Unggulan Satu Harga Bahan Pangan Strategis serta Menjamin Kestabilan Harga. Menjamin kebutuhan dasar Masyarakat miskin, Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM
4. **Berani Lancar**, dengan program unggulan Pembangunan Jalan Desa untuk menjamin konektivitas antar wilayah, Perbaikan Infrastruktur jalan Provinsi Kondisi Rusak Berat
5. **Berani Menyala**, dengan program unggulan Jaminan Ketersediaan Jaringan Internet bagi Desa yang masih termasuk dalam wilayah Blank Spot, Jaminan Ketersediaan Akses Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Penerangan Jalan Umum bagi Daerah yang belum terjangkau.
6. **Berani Makmur**, dengan program unggulan Program Petani Milenial, mendorong Modernisasi Alsintan, Bibit, Pemberian Subsidi Pupuk, Program Resi Gudang, Bantuan Alat Tangkap Nelayan, Jaminan Sosial bagi Petani & Nelayan, Jaminan Harga Jual Tinggi; Selain itu Berani Makmur dapat mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan
7. **Berani Berkah**, dengan Program unggulan Sulteng Berjamaah, Sulteng Mengaji, Insentif bagi Guru Mengaji, Marbot, Pendeta/Tokoh Agama dan Pemangku Adat serta Penyetaraan Status Pesantren, Madrasah dan Sekolah



Keagamaan, perbaikan sarana prasarana keagamaan dan Memperkuat peran FKUB dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat

8. **Berani Harmoni**, dengan program unggulan **Berani Wisata** dengan Dinas Pariwisata (berani wisata dan berani kreatif). **Berani Ekonomi Kreatif** melalui Sulteng Creative Center (SCC) Melakukan inkubasi UMKM focus peningkatan ekonomi Masyarakat melalui keberlanjutan destinasi dan aktifitas ekonomi kreatif. Pembentukan Sulteng Creative Center dengan Menyusun Pergub komite ekonomi kreatif Sulteng serta penyusunan roadmap SCC (bencmaking, penyediaan infrastruktur bagi pelaku ekraf dan fasilitasnya dengan mengoptimalkan dengan pemanfaatan asset Provinsi (diusulkan Gedung JCC, asset dinas Pariwisata atau Gedung Wanita, asset biro umum). **Berani pariwisata** partisipatoris yaitu integrasi pelestarian bahasa daerah, tenun ikat bomba, dan potensi adat dan budaya Sulteng melalui penyelenggaraan event-event Community-Based Tourism, mendorong pergerakan ekonomi melalui event/atraksi: mendorong one compeny one even; one cabor one event; one cumunity one event. **Berani Wirausaha Baru** menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing terutama generasi muda. **Berani Carier center** melaksanakan bimbingan jabatan, naker to kampus, naker to school SMA dan SMK. **Berani Berbudaya**; Berani menanamkan nilai –nilai kearifan lokal dalam Pemerintahan antara lain terdapat satu hari menggunakan Bahasa daerah; Berani menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan religi pada kehidupan masyarakat. **Berani Lestari**: Berani menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal; Dalam mejaga kelestrarian kebudyaan



dan ekonomi kreatif **Berani Produktif dan Berekspresi:** Berani mengembangkan dan memanfaatkan obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya Bernilai ekonomi; **Berani Bumdes Sukses** memfasilitasi bumdes berbadan hukum melaksanakan pelatihan, penguatan bumdes, mengikuti bumdes dalam setiap event; melakukan revitalisasi kelembagaan Bumdes/Bumdes Berasama; Peningkatan Kualitas Management atau penguatan organisasi Bumdes atau Bumdes Bersama; Penguatan Pengelolaan Usaha Bumdes/Bumdes Bersama dan Unit usaha Bumdes/Bumdes. **Berani berinvestasi** mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi investor; meningkatkan promosi - Memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru; Membuat kajian investasi hijau dan invesasi biru; **Berani bermitra** dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas. Selain itu juga dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih

9. **Berani Berintegritas**, dengan program unggulan Tim Gaspoll (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung)–Call Center, Siaga Laporan - Command Center, Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE, Budaya Kerja Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif (Berani), Co Working Space (CWS) bagi ASN, Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa.



4.3 Perubahan Kebijakan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025

Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 masih mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026. Sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2025 di dasarkan pada arahan dalam RPJMD di maksud.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah RKPD ke Empat dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026, sekaligus akan menjadi bagian dari tahun pertama pentahapan RPJMD dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2045. Oleh karena itu untuk mencapai kesinambungan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021-2026, memperhatikan tahapan, arah Pembangunan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Banggai 2025–2045, juga berpedoman pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2025 serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

4.3.1 Kebijakan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021–2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 11 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026, di tetapkan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banggai yaitu : **“Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri Dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal”**



Gambar 4.5
Visi dan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026



Selanjutnya Visi tersebut di atas di jabarkan dalam Rumusan Misi, yakni sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.
2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
5. Pengembangan Pariwisata, Budaya serta Nilai Keagamaan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Selain Visi dan Misi di atas, RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026 dalam hal ini memuat juga janji-janji politik selama masa kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati



Banggai terpilih dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Janji Politik di maksud yakni sebagai berikut:

a. Program Aksi dalam Penyampaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai meliputi 9 (Sembilan) Program Aksi yaitu :

- 1) Gratis Pelayanan Kesehatan
- 2) Gratis Pelayanan Pendidikan
- 3) Gratis Bibit Pertanian, Perkebunan dan Subsidi Pupuk
- 4) Gratis Bibit Ternak
- 5) Gratis Alat Tangkap Nelayan
- 6) Gratis Pelatihan Buruh
- 7) Gratis Pelayanan Perizinan Usaha
- 8) Gratis Pelayanan KTP dan KK
- 9) Tunjangan Kinerja ASN dan Peningkatan Upah Honorer

Kesembilan Rencana Aksi ini telah di jabarkan dalam Prioritas Daerah dan Program Prioritas daerah serta Indikasi Kegiatan Prioritas daerah sebagaimana di uraikan pada bagian sebelumnya, dan akan terjabarkan dalam sub-sub kegiatan pada setiap perangkat daerah.

b. Program Prioritas

Program Prioritas yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menghidupkan, Mengembangkan dan Promosi Budaya Masyarakat Adat Banggai Untuk Mendukung Kearifan Lokal.
- 2) Percepatan Pembangunan Jalan Umum, Jalan Tani, dan Jalan Kantong Produksi.
- 3) Mengatasi Masalah Listrik dan Air Bersih.



- 4) Memberi Peluang dan Prioritas Utama Kepada Pengusaha/Kontraktor Lokal Dalam Kegiatan Pembangunan Daerah.
 - 5) Program Satu Pekarangan Satu Juta Untuk Peningkatan Ekonomi Ibu Rumah Tangga.
 - 6) Bantuan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 7) Perbaikan Data Kemiskinan, Kependudukan, SDA dan SDM.
 - 8) Perbaikan Data Kepemilikan Tanah.
 - 9) Santunan Fakir Miskin.
 - 10) Santunan Rumah Ibadah, Peningkatan Insentif Pengurus Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan.
 - 11) Pengembangan Minat dan Bakat Kepemudaan di Bidang Seni dan Olahraga.
- c. Program Unggulan Kreatif dan Inovatif
- Program Unggulan Kreatif dan Inovatif yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) BANGGAI DESAPRENEUR Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Pedesaan Untuk meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa.
 - 2) BANGGAI YOUTHPRENEUR Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Untuk Menggali Potensi Kepemudaan.
 - 3) BANGGAI INNOVATION CENTRE Pusat Inovasi dan Wadah Kreatifitas Untuk Menunjang Serta Mengembangkan Potensi SDM, SDA dan Ekonomi Kreatif.
 - 4) BANGGAI CULTURAL HERITAGE Pusat Kebudayaan dan Sentra Promosi Budaya Kabupaten Banggai.



- 5) PROGRAM SATU BUMDES 500 JUTA Untuk Meningkatkan Kualitas Industri Pedesaan dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa.

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, kemudian di tetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai selama Periode Tahun 2021-2026 yakni sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banggai 2021–2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal		
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif Dan Sejahtera	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera
Misi 2 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif Dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi, Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal.	1. Meningkatkan Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru.
		2. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perdesaan
Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana	Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana	1. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas.



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
		2. Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.
		2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.
Misi 5 : Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	1. Peningkatan Pariwisata Daerah	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah
	2. Peningkatan Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Meningkatnya Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan Serta Moderasi Beragama.
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel	Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai



Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026, sebagaimana di atas, di tetapkan indikator dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2021–2026 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banggai sebagaimana table 4.2 berikut:



Tabel 4.2
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026

NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
Visi : Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal											
1.	Misi I : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas , Produktif Dan Sejahtera										
		Tujuan 1.1 Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,22	71,69	72,16	72,63	73,10	73,57	73,57
		Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,22	71,69	72,16	72,63	73,10	73,57	73,57
			2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	N/A	45,3	45,7	46,1	46,5	46,9	46,9
			3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,42	2,34	2,30	2,26	2,22	2,18	2,18
			4. Angka Kemiskinan	%	7,39	6,70	6,28	5,85	5,43	5,00	5,00
			5. Gini Rasio	Point	0,308	0,297	0,292	0,287	0,282	0,277	0,277



NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
2.	Misi II : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi										
		Tujuan 2.1 Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif Dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi, Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal.	Pertumbuhan usaha perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM dalam PDRB	%	2,54	3,23	3,92	4,61	5,30	5,99	5,99
		Sasaran 2.1.1 Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru.	Kontribusi usaha perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	%	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	5,7	5,7
		Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	%	26,12	37,80	46,39	68,73	72,50	75,00	75,00
3.	Misi III : Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana										
		Tujuan 3.1 Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks/ predikat	N/A	75,83 / Kurang Baik	76,61 / Baik	77,39/ Baik	78,17 / Baik	78,95 / Baik	78,95 / Baik
			2. Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	163,20	163,20	163,20	163,20	140,00	140,00	140,00



NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Sasaran 3.1.1 Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infarstruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas.	Persentase Infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi Baik	Indeks	NA	70,00	72,50	75,00	78,00	80,00	80,00
		Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.	Indeks Ketahanan Daerah	Kategori	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
4.	Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan										
		Tujuan 4.1 Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan	Pertumbuhan Ekonomi	%	-4,78	3,23	3,92	4,61	5,30	6,00	6,00
		Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian,	Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan	%	2,54	3,23	3,92	4,61	5,30	5,99	5,99



NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	dan pertambangan terhadap PDRB								
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85,38	86,64	87,17	88,67	89,53	90,00	90,00
		Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,61	80,418	81,218	82,018	82,818	83,618	83,618
5.	Misi V : Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan										
		Tujuan 5.1 Peningkatan Pariwisata Daerah	Pertumbuhan Sektor Pariwisata dalam PDRB	%	2,13	2,16	2,66	3,16	3,66	4,16	4,16
		Tujuan 5.2 Peningkatan Kebudayaan Daerah serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	48,11	50,16	52,21	54,26	56,31	56,31
		Sasaran 5.1.1 Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2,19	2,37	2,56	2,74	2,92	3,10	3,10

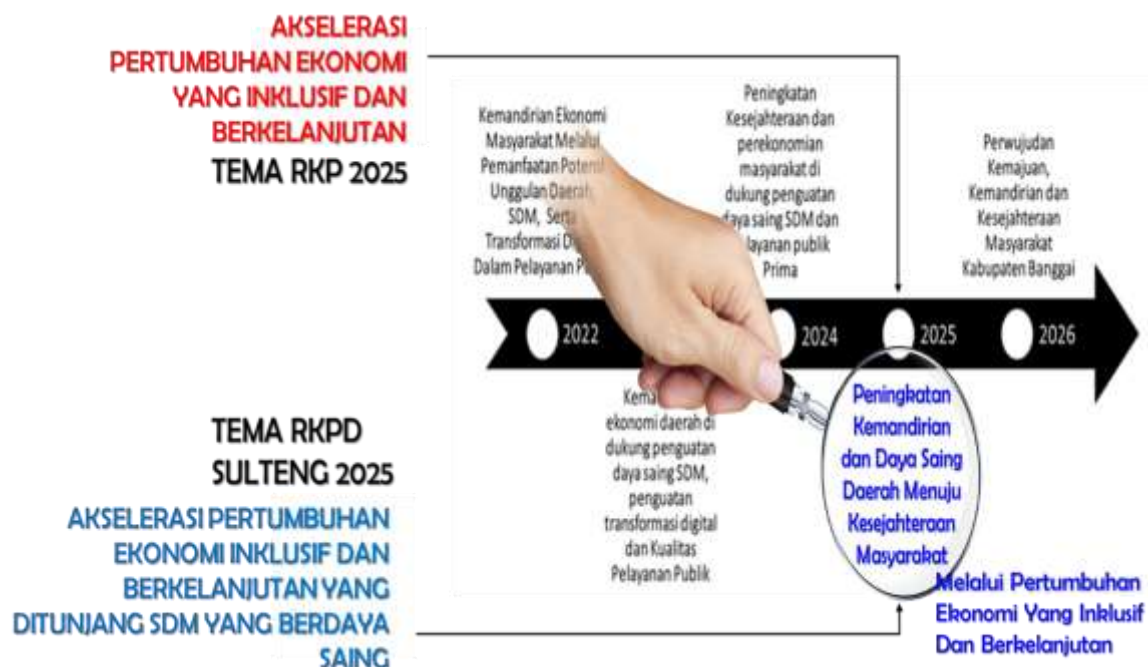


NO	VISI/ MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Sasaran 5.1.2 Meningkatnya Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan Serta Moderasi Beragama.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	48,11	50,16	52,21	54,26	56,31	56,31
6.	Misi VI : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel										
		Tujuan 6.1 Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	BB	BB	BB	A	A
		Sasaran 6.1.1 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	BB	BB	BB	A	A
			Indeks Inovasi Daerah	Predikat / kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat inovatif / Ter inovatif	Sangat inovatif / Ter inovatif	Sangat inovatif / Ter inovatif	Sangat inovatif / Ter inovatif	Sangat inovatif / Ter inovatif
			Nilai SAKIP	Predikat	A	A	A	AA	AA	AA	AA



Berdasarkan tema Pembangunan Nasional dan tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 serta hasil kesepakatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025, ditetapkan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 yaitu: **“Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat, melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Gambar 4.6
Tema RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025



Mendasari permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah tahun 2025, tema pembangunan daerah, serta memperhatikan kriteria penentuan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta Prioritas Nasional (PN) dalam Narasi Rancangan RKP tahun 2025 dan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, maka di tetapkan 8 (Delapan) Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :



1. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi.
3. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
4. Ketahanan Pangan Daerah.
5. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.
7. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
8. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Gambar 4.7
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2025



Setiap prioritas daerah di tetapkan sasaran yang akan di wujudkan. Sasaran di maksud bersesuaian dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026, sekaligus merupakan Sasaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025. Adapun sasaran daerah berdasarkan



masing-masing prioritas daerah, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2025

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
	a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,72
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37
		3. Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	96,06
	b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,80
		Privalensi Stunting (EPPGBM)	%	14,68
		Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	89,32
	c. Meningkatnya Kesenjangan Gender, Kualitas Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,00
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	46,1
		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	51,03
		Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Kategori	Rendah
	d. Meningkatnya Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,96
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,26
	e. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banggai	1. Angka Kemiskinan	%	5,85
		2. Gini Rasio	nilai	0,287
		3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	72,63
	f. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	40,51
		Indeks Pembangunan Olah Raga	Indeks	0,2
2.	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi			
	g. Meningkatnya Kualitas Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru.	Persentase Koperasi Aktif dan Berkualitas/modern	%	77,988
		Persentase UMKM Naik Kelas/Go Digital	%	86,50
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	8%



No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
	h. Meningkatkan Perekonomian Desa Melalui Pemberdayaan BUMDes	Persentase BUMDes Sehat	%	49,50
		Skor Ketahanan Ekonomi Desa (Berdasarkan IDM)	%	0,5767
	i. Meningkatkan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,61
		Inflasi Daerah	%	2,04
3.	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
	a. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase Rumah Tanggadengan akses air minum layak dan aman	%	87,04
		2. Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	%	84,26
		3. Persentase Rumah Tangga dengan Akses rumah layak huni	%	87,19
	b. Tersediannya Infrastruktur Wilayah Untuk Mendukung Aktivitas Perekonomian dan Konektivitas Wilayah yang berkualitas dan Merata	1. Persentase Luas sawah beririgasi	%	90
		2. Persentase Kondisi jalan mantap Kabupaten	%	99,53
		3. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan sektor transportasi	Indeks	0,364
		4. Persentase Desa yang telah memiliki akses terhadap jaringan internet	%	49
4.	Ketahanan Pangan Daerah			
	a. Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai swasembada Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,6
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	%	2,3
	b. Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Nilai Tukar Petani	Nilai	N/A
		Nilai Tukar Nelayan	Nilai	N/A
5.	Investasi Daerah di Sektor Pertambangan			
	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Pertumbuhan sektor pertambangan dan Penggalian dalam PDRB	%	2,54
		Nilai Investasi Pertambangan Milik Daerah	Nilai	N/A
6.	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah			
	a. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang, Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	82,018



No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
	Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Nilai	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	75
	b. Menurunkan Resiko Bencana di Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	kategori	Sedang
7.	Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama			
	a. Meningkatnya Pariwisata Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	2,74
	b. Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Babasalan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	52,21
	c. Meningkatnya Moderasi Beragama Masyarakat Kabupaten Banggai	Indeks Moderasi beragama	Indeks	68
8.	Penguatan Reformasi Birokrasi			
	a. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	B
	b. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP/ WDP	WTP
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	Sangat Baik
		Nilai LPPD	Predikat	Baik
		Maturitas SPIP	Level	Level 3
		Kapabilitas APIP	Level	Level 3
		Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks	Baik
		Nilai SAKIP	Predikat	A
	c. Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur	Nilai Kematangan Organisasi	Nilai	
		Indeks Sistem Merit	Kategori	Baik

Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagaimana di atas kemudian di jabarkan kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.4 berikut:



Tabel 4.4

Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Banggai Tahun 2025

NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
PD1.	Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan Dasar menuju Banggai cerdas.	KPD1. Peningkatan Kualitas dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Merata pada semua Satuan Pendidikan.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			KPD2. Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, melalui penerapan SPM Pendidikan Dasar.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
			KPD3. Pengembalian Anak Tidak Sekolah melalui Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Usia 22-55 Tahun ke jenjang Non Formal (PKBM)	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum
			KPD4. Dukungan Fungsi Pendidikan terhadap Stunting melalui Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif, kelas Parenting, Penguatan UKS dan Sanitasi Sekolah.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
			KPD5. Peningkatan Minat Baca Siswa dan Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan
		PP2. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan menuju Banggai Sehat	KPD1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 4. Program Pengendalian Penduduk.
			KPD2. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
			KPD3. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (promotif dan Preventif Covid 19).	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			KPD4. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (<i>Prevent, detect, alert System</i> dan <i>response</i>).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
			KPD5. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan masyarakat (fasilitas, farmasi, alkes dan SDM Kesehatan) sesuai SPM Kesehatan.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.
			KPD6. Peningkatan Pelayanan Rujukan RSUD Luwuk	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
		PP3. Banggai produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan	KPD1. Pelaksanaan Pendidikan Vokasional	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			KPD2. Perluasan Akses Permodalan bagi Wirausahawan baru.	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 3. Program Pengembangan UMKM
			KPD3. Perumusan dan Penetapan regulasi daerah yang pro pada kepentingan tenaga kerja lokal.	1. Program Penempatan Tenaga Kerja 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			KPD4. Penyiapan Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan Kebutuhan Industri.	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial
			KPD5. Fasilitasi BLK Komunitas dan <i>Start Up Company</i> .	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
		PP4. Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera	KPD1. Validasi Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin untuk Berbagai Skema Bantuan Sosial.	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			KPD2. Penataan Skema Bantuan Sosial Masyarakat Miskin dan Terdampak Bencana (Bansos Adaktif).	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			KPD3. Penanganan PMKS, Lansia dan ODGJ	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
			KPD4. Inovasi "Tumis Ikan Teri" Tuntaskan Kemiskinan melalui kegiatan Terintegrasi.	Semua Program Terkait Kemiskinan di Perangkat Daerah sesuai Cross Cutting Penanggulangan Kemiskinan.
		PP5. Peningkatan Kualitas Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	KPD1. Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, di dukung melalui program Satu Juta Satu Pekarangan	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. 2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
			KPD2. Pemenuhan Hak dan perlindungan anak dan perempuan	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 5. Program Pemenuhan Hak Anak. 6. Program Perlindungan Khusus Anak.
			KPD3. Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender.	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
		PP6. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olah Raga	KPD1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pramuka.	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
			KPD2. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
			KPD3. Pembinaan Olah Raga Tradisional Masyarakat.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
			KPD4. Pelaksanaan Banggai YOUTHPRENEUR	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
PD2.	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi	PP1. Pengembangan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi	KPD1. Modernisasi Koperasi (Koperasi Generasi Baru) berbasis wirausaha.	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi. 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian. 4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.
			KPD2. UMKM Naik Kelas dan Go Digital	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM). 2. Program Pengembangan UMKM.
			KPD3. Pengembangan sentra industry potensi lokal/pangan lokal dengan pendekatan kelompok, Komunitas dan Cluster, di dukung Program Satu Juta Satu Pekarangan	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			KPD4. Pengembangan Kemitraan dalam pemberdayaan KUKM	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM). 2. Program Pengembangan UMKM.
		PP2. Pengembangan BUMDes dan Ekonomi Perdesaan	KPD1. Pelaksanaan Program Satu BUMDes 500 Juta melalui Revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa. 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
			KPD2. Pelaksanaan DESAPRENEUR melalui pelatihan Kewirausahaan masyarakat perdesaan untuk kemandirian ekonomi Desa.	1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
				2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
		PP3. Pengembangan IKM dan Perdagangan	KPD1. Pengendalian Inflasi melalui Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok.	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			KPD2. Akses Pasar IKM	1. Program Pengembangan Ekspor. 2. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			KPD3. Peningkatan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD.	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
			KPD4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui TERA Sah.	1. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.
PD3.	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Perumahan, Air Bersih dan Sanitasi Layak	KPD1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman layak, aman dan terjangkau.	1. Program Pengembangan Perumahan. 2. Program Kawasan Permukiman. 3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh. 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			KPD2. Peningkatan Akses rumah Tangga 1000 HPK/Desa Stunting Terhadap Air Minum, bersih dan layak.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			KPD3. Peningkatan Akses rumah Tangga 1000 HPK/desa Stunting terhadap Sanitasi Layak.	1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional. 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			KPD4. Peningkatan Kualitas Layanan Air Bersih Kota Luwuk.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		PP2. Penyediaan Infrastruktur Pemerintahan untuk	KPD1. Pembangunan Kantor 5 Perangkat Daerah.	Program Penataan Bangunan Gedung
			KPD2. Pembangunan Mall Pelayanan Publik.	
			KPD3. Pengembangan Kantor Bupati Banggai	



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
		Peningkatan Pelayanan Publik.		
		PP3. Peningkatan Konektivitas Wilayah ke Pusat Produksi dan Pariwisata	KPD1. Peningkatan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan
			KPD2. Peningkatan Fasilitas Keamanan dan Keselamatan Transportasi.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
			KPD3. Perencanaan, penataan dan pengembangan Pelabuhan Rakyat Luwuk	2. Program Pengelolaan Pelayanan
		PP4. Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Transformasi Digital dan Fasilitasi Ketenagalistrikan	KPD1. Penuntasan Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi Kabupaten Banggai	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			KPD2. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung Transformasi Digital	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			KPD3. Peningkatan Literasi TIK Masyarakat.	2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			KPD4. Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Covid 19	
			KPD5. Fasilitasi Listrik bagi desa yang belum teraliri listrik	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			KPD6. Fasilitasi Perluasan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga	2. Program Perekonomian Dan Pembangunan
PD4.	Ketahanan Pangan Daerah	PP1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas TPHP	KPD1. Penerapan <i>Smart Farm</i> (pertanian cerdas, terukur dan terintegrasi)	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			KPD2. Peningkatan Produksi Pertanian (lahan, bibit/benih, saprodi, alsintan dan jaringan irigasi serta kelembagaan petani)).	2. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			KPD3. Peningkatan produk olahan hasil pertanian	3. Program Perizinan Usaha Pertanian
			KPD4. Pembangunan Jalan Kantong Produksi dan Jalan Usaha Tani	4. Program Penyuluhan Pertanian
			KPD5. Implementasi satu Juta satu pekarangan	
		PP1. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	KPD1. Peningkatan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat.	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
			KPD2. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, terutama di desa rawan pangan, kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan Desa Stunting.	2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
			KPD3. Implementasi satu Juta satu pekarangan	
		PP2. Peningkatan Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan	KPD1. Penerapan <i>Smart Farm</i> (Perikanan cerdas, terukur dan terintegrasi)	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			KPD2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	
			KPD3. Peningkatan industri Hasil Olahan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
		PP3. Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak	KPD1. Ketersediaan benih dan bibit ternak bermutu	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			KPD2. Ketersediaan dan Produksi pakan ternak	2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			KPD3. Produk hewani yang ASUH dan Berdaya Saing	3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			KPD4. Peningkatan peran dan Fungsi Kelembagaan Peternak	4. Program Perizinan Usaha Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian
			KPD5. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
PD5.	Investasi Daerah di Sektor Pertambangan	PP1. Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	KPD1. Pengembangan sistem pola Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas.	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan
			KPD2. Kerjasama Pendidikan antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak dan gas	
			KPD3. Re-negosiasi antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas untuk	



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
			meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Banggai.	
			KPD4. Pembangunan industri usaha minyak dan gas daerah dengan melakukan Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas.	
			KPD5. Fasilitasi pembangunan Jaringan Gas (City Gas) melalui Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak dan gas.	
		PP2. Pengembangan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif	KPD1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman modal.	1. Program Pelayanan Penanaman Modal. 2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
			KPD2. Promosi Investasi/penanaman modal berbasis potensi lokal.	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal
			KPD3. Koordinasi dan Kerjasama Pemda dan Dunia Usaha/Swasta	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
			KPD4. Kondusifitas Wilayah untuk Investasi.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			KPD5. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Program Perekonomian Dan Pembangunan
		PP3. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	KPD1. Revisi RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 beserta rencana rincinya.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			KPD2. Penengakan Insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang.	
			KPD3. Peningkatan pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan ruang	
			KPD4. Percepatan penyediaan data dan informasi geospasial.	
PD6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah			



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
			KPD5. Penataan pertanahan untuk kepentingan umum	1. Program Pengelolaan Izin Lokasi 2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 4. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 5. Program Penetapan Tanah Ulayat 6. Program Pengelolaan Tanah Kosong 7. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah 8. Program Penatagunaan Tanah
		PP4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	KPD1. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			KPD2. Penguatan kelembagaan, peran serta masyarakat dan penegakan hukum bidang SDA dan lingkungan hidup.	1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
				4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			KPD3. Peningkatan kualitas pelayanan persampahan kota Luwuk	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			KPD4. Pelaksanaan dan penegakan RAD Gas Rumah Kaca	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		PP5. Peningkatan Ketahanan Bencana Alam dan Non Alam	KPD1. Pengembangan Desa Tangguh Bencana/Desa Tangguh lawan covid 19.	Program Penanggulangan Bencana
			KPD2. Penguatan Manajemen Bencana Berbasis masyarakat.	
			KPD3. Penguatan Sistem Data Bencana terpadu dan satu referensi.	
			KPD4. Penguatan system logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana.	
			KPD5. Penguatan system peringatan dini bencana.	
			KPD6. Penguatan system penanggulangan bahaya kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	PD7. Pariwisata, Kebudayaan dan Moderasi Beragama	PP1. Peningkatan Pariwisata Daerah.	KPD1. Pengembangan 3 destinasi pariwisata prioritas (Pulo Dua, Salodik dan Teluk Lalong)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			KPD2. Pengembangan industri pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			KPD3. Peningkatan promosi pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
			KPD4. Pengembangan kelembagaan pariwisata.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		PP2. Pemajuan dan Pelestarian Budaya Babasalan.	KPD1. Pelestarian cagar budaya daerah	1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 2. Program Pengelolaan Permuseuman



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
			KPD2.Pelaksanaan festival, promosi dan even kebudayaan daerah lainnya.	1. Program Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			KPD3.Muatan lokal Bahasa daerah Babasal di sekolah	1. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 2. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
			KPD4.Pelaksanaan BANGGAI CULTURAL HERITAGE	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pembinaan Sejarah
		PP3. Moderasi Beragama	KPD1.Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			KPD2.Aktivasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Wawasan Kebangsaan.	1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
PD8.	Penguatan Reformasi Birokrasi	PP4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Indeks Inovasi Daerah	KPD1.Optimalisasi OSS untuk perizinan dan investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal.
			KPD2.Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan.	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
			KPD3.Pelaksanaan BANGGAI INOVATION CENTRE	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			KPD4.Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. 2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
		PP5. Penataan Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Aparatur	KPD1.Evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dan proses bisnis	Program Penataan Organisasi
			KPD2.Peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN	Program Kepegawaian Daerah



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
			KPD3. Peningkatan manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>	
			KPD4. Peningkatan diklat struktural dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PP6. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	KPD1. Implementasi Satu Data Banggai	1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			KPD2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			KPD3. Efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>E - Procurement</i>	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			KPD4. Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			KPD5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		PP7. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda	KPD1. Peningkatan keterbukaan informasi publik (Anggaran, Pengadaan barang dan Jasa, dll).	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			KPD2. Peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			KPD3. Peningkatan implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			KPD4. Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan DPRD dan Masyarakat.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		PP8. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	KPD1. Peningkatan kualitas program legislasi daerah.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			KPD2. Evaluasi dan Penataan produk hukum daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
			KPD3. Penegakan pelaksanaan produk hukum daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
			KPD1. Peningkatan kualitas Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.	1. Program Penataan Organisasi 2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah



NO	PRIORITAS DAERAH (PD)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH (PPD)	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (KPD)	PROGRAM NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
		PP9. Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah dan Otonomi Desa		3. Program Kesejahteraan Rakyat 4. Program Perekonomian dan Pembangunan 5. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 6. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			KPD2. Peningkatan Fungsi Kearsipan	1. Program Pengelolaan Arsip 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 3. Program Perizinan Penggunaan Arsip
			KPD3. Pelimpahan kewenangan ke Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			KPD4. Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Pemerintahan Desa	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa. 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



4.3.2 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Periode 2025–2030.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih Periode 2025–2030 Ir. H. Amirudin, MM, AIFO dan Drs. H. Furqanudin Masulili adalah **Bergerak Bersama Berkelanjutan Menuju Gerbang Timur Sulawesi Tengah (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa)**. Pokok–Pokok atau makna Visi di maksud adalah sebagai berikut :

- **BERGERAK BERSAMA** Bergerak Bersama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholders Pembangunan di daerah dengan prinsip PENTAHELIX
- **BERKELANJUTAN** Merupakan kelanjutan dari kinerja dan capaian Pembangunan pada periode kepemimpinan kami sebelumnya.
- **GERBANG TIMUR** merupakan singkatan dari GERAKAN BANGGAI TERDEPAN, INOVATIF, MAJU DAN SEJAHTERA, yang masing–masing di maknakan sebagai berikut :
 - **GERBANG TIMUR** dapat di maknakan sebagai Kondisi Kabupaten Banggai sebagai pusat pelayanan pendidikan, Kesehatan, perdagangan, jasa, industri pertanian, perikanan/kelautan, pertambangan dan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kawasan Timur Sulawesi Tengah.
 - **TERDEPAN** artinya Kabupaten Banggai sebagai Kabupaten juara, unggul dan terdepan di bandingkan daerah lainnya di Sulawesi Tengah dalam berbagai aspek Pembangunan.



- **INOVATIF** artinya mengarusutamakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan publik.
- **MAJU** artinya Berdaya, kualitas hidup tinggi, modern, Tangguh, inovatif, produktif dan mampu memanfaatkan sumber ddaya local untuk memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri.
- **SEJAHTERA** artinya taraf hidup meningkat, sehat, produktif, berpendidikan, aman dan Bahagia.
- **SULAWESI TENGAH** Bagian dari Propinsi Sulawesi Tengah.

Indikator keberhasilan Visi di maksud di ukur dari :

Tabel 3.1

Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029

NO	Sasaran Visi RPJMD Tahun 2025-2029	Target Sasaran	
		BASE LINE 2025	TARGET 2029
PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA			
1.	PDRB Perkapita (Juta Rp)	119,11 Juta Rp	166,55 Juta Rp
2.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (%)	41,29 %	45,82 %
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	32,30	33,05
KEMISKINAN MENURUN DAN KETIMPANGAN BERKURANG			
1.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,27 – 6,51	4,95 - 5,50
2.	Indeks Gini (Angka)	0,300	0,260
3.	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	11,05	12,75
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,14	4,78
KEPEMIMPINAN DAERAH UNTUK MENCAPAI VISI DAERAH			
1.	Indeks Inovasi Daerah (Kategori)	Inovatif	Sangat Inovatif
2.	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,50	3,90
PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	72,86 - 73,43	74,00 - 75,56
PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISSION			
1.	Penurunan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ₂ eq)	609.706,30	965.469,34



NO	Sasaran Visi RPJMD Tahun 2025-2029	Target Sasaran	
		BASE LINE 2025	TARGET 2029
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	81,88	83,63

Guna mewujudkan Visi sebagaimana di atas, maka di rumuskan Misi sebagai berikut :

- 1. SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing**
- 2. Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan**
- 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan.**
- 4. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif**

Penjelasan masing-masing Misi adalah sebagaimana Gambaran berikut ini :



MISI 1
**SDM UNGGUL,
BERBUDAYA DAN
BERDAYA SAING**

Di lakukan melalui Transformasi pada seluruh siklus hidup manusia Kabupaten Banggai melalui Pendidikan, pelatihan dan penguasaan IPTEK, peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat, pengasuhan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pemajuan kebudayaan daerah, beragama maslahat, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlindungan dan bantuan sosial yang adaatif.



MISI 2
**EKONOMI DAERAH
TANGGUH DAN
INKLUSIF BERBASIS
POTENSI
UNGGULAN**

Hendak di wujudkan ekonomi daerah yang maju dan berkeadilan yang di tunjukan dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang tinggi dan stabil, produktivitas kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi. Hal ini di lakukan melalui percepatan terwujudnya industri sektor pangan (pertanian dan perikanan/kelautan), pengembangan koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi perdesaan (BUMDes) berbasis inovasi teknologi dan tranformasi digital. Serta peningkatan peran BUMD dalam pengelolaan potensi Minyak dan Gas Bumi.



Sebagai dasar dan pijakan untuk Pembangunan daerah tahap berikutnya, maka percepatan Pemenuhan sarana prasarana dasar, konektivitas dan TIK yang berkualitas, ramah lingkungan, terjangkau dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggai, akan di lakukan melalui Misi 3 ini. Misi ini juga memberi arahan pengelolaan lingkungan hidup yang Lestari dan berketahanan, resiliensi bencana dan perubahan iklim.



Misi ini di arahkan pada Upaya untuk mengurangi kesenjangan wilayah di Kabupaten Banggai dengan cara antara lain percepatan pencapaian desa Maju dan Mandiri, persiapan dan percepatan pemekaran wilayah desa, Kecamatan dan DOB, Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan dan Tambahan Dana Kelurahan.



Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berorientasi hasil, di lakukan transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi antara lain kelembagaan daerah yang efektif, penguatan system merit, manajemen talenta ASN, peningkatan aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan public terpadu, serta transformasi layanan pemerintahan berbasis digital.

Sebagai percepatan terwujudnya fondasi untuk Banggai Emas 2045 sebagaimana tahapan awal dalam perodesasi RPJPD 2025–2045, dan juga sebagai kelanjutan dari program kami pada periode sebelumnya 2021–2024, maka dalam 5 Tahun kedepan pada periode 2025–2029 di tetapkan **9 Program Unggulan Kreatif dan Inovatif, 9 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan 9 Program Aksi** yang di sebut sebagai **NAWAITU**.



Sesuai Visi BERGERAK BERSAMA MENUJU GERBANG TIMUR SULAWESI TENGAH (GERakan BANGgai Terdepan, Inovatif, MajU dan sejahteRa), GERBANG di terjemahkan sebagai GERAKAN BANGGAI atau GERAKAN MEMBANGUN untuk mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Kabupaten yang Terdepan, Inovatif, Maju dan Sejahtera (TIMUR). Untuk mewujudkan GERBANG di maksud, maka di rumuskan program unggulan kreatif dan inovatif yaitu sebagai berikut :

1. **GERBANG SEHAT**, Gerakan Banggai untuk mewujudkan derajat Kesehatan Masyarakat yang tinggi.
2. **GERBANG CERDAS**, Gerakan Banggai untuk mewujudkan generasi cerdas, berahlak dan berbudi pekerti luhur serta menguasai IPTEK.
3. **GERBANG PRODUKTIF SEJAHTERA**, Gerakan Banggai untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, sesuai dengan tuntutan pasar kerja, pengangguran berkurang , ekonomi produktif, investasi meningkat dan Tanpa miskin ekstrim,
4. **GERBANG BERBUDAYA**, Gerakan Banggai untuk melestarikan nilai-nilai budaya BABasalan, serta pengembangan pariwisata daerah (alam dan Budaya).
5. **GERBANG DESA**, Gerakan Banggai membangun Desa untuk mencapai Desa Maju dan Mandiri.
6. **GERBANG PANGAN**, Gerakan Banggai untuk meningkatkan nilai tambah potensi pertanian, perikanan dan kelautan, dan peternakan, serta Gerakan Banggai untuk pemasaran pemanfaatan pekarangan oleh rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
7. **GERBANG DIGITAL DAN TERANG**, Gerakan Banggai untuk mempercepat terlaksananya Transformasi Digital di berbagai sektor, serta Gerakan Banggai untuk mewujudkan akses



Masyarakat terhadap penerangan Listrik Rumah Tangga maupun penerangan jalan.

8. **GERBANG LAYAK, BERSIH DAN LANCAR**, Gerakan Banggai untuk pemenuhan sarana prasarana dasar (perumahan, air bersih, sanitasi layak), Banggai (Luwuk) Bersih, Lingkungan Hidup Terjaga dan Mitigasi Bencana serta Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan.
9. **GERBANG AMANAH**, Gerakan Banggai untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Inovatif dan Akuntabel.

Keseluruhan GERBANG di atas di laksanakan secara kolaboratif, melibatkan seluruh stakeholders Pembangunan secara PENTAHHELIX, dalam bentuk GERAK BERSAMA.

Selanjutnya untuk menjabarkan lebih lanjut tentang Gerakan Banggai (Gerbang) di atas, di rumuskan 9 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yaitu sebagai berikut:

1. **Kabupaten/Kota Pintar dan Desa Pintar.**
2. **Puskesmas BLUD dan Rumah Sakit tipe D**
3. **Tuntas Wajar 9 Tahun menuju Wajar 13 Tahun**
4. **Germas Pemanfaatan Pekarangan.**
5. **Kecamatan/Kelurahan/Desa Maju dan Mandiri**
6. **PI 10 % melalui BUMD Banggai Energi Utama**
7. **Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas.**
8. **Pusat Perkantoran Halimun**
9. **Perguruan Tinggi Maju dan Unggul**



9 Program Cepat NAWAITU tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:



1

KABUPATEN/KOTA PINTAR DAN DESA PINTAR

Konsep Smart City atau kota cerdas sejatinya berdasar pada hal-hal fundamental, yakni inovasi dan teknologi. Smart City adalah suatu konsep pengembangan kota

yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Setidaknya ada enam dimensi yang harus diimplementasikan untuk menjadi kabupaten/Kota cerdas, antara lain; 1) Tata kelola pemerintahan cerdas; 2) Konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi; 3) Kehidupan yang cerdas menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat dalam satu kabupaten/kota; 4) Tata kelola lingkungan dalam pembangunan; 5) Inovasi dalam memasarkan daerahnya dengan memanfaatkan teknologi; dan 6) Mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan era informasi saat ini.

Program ini akan di lakukan melalui pemenuhan Peta Jalan Pembangunan Smart City Kabupaten Banggai, baik jangka pendek maupun jangka menengah, untuk mewujudkan *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*. Sedangkan Smart Vilage di laksanakan sesuai Sedangkan Smart Vilage atau Desa Cerdas yaitu desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemanfaatan teknologi dan layanan digital dalam berbagai aspek Pembangunan desa, sehingga menuju kemandirian Desa.



Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat yang responsif, terjangkau, merata, professional, transparan dan Akuntabel, maka penerapan BLUD bagi Puskesmas adalah alternatif yang tepat. BLUD Puskesmas di



2

PUSKESMAS BLUD DAN RUMAH SAKIT TIPE C

harapkan dapat merespon kebutuhan pelayanan Kesehatan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu puskesmas dapat lebih berkembang dan mandiri. Selanjutnya untuk mendukung keberadaan RSUD Luwuk sebagai Rumah sakit Tipe B, beberapa Puskesmas di Kabupaten Banggai dapat di tingkatkan kelasnya menjadi Tipe D, sedangkan Rumah Sakit Pratama Pagimana di percepat untuk menjadi RSUD tipe C.



3

TUNTAS WAJAR 9 TAHUN MENUJU WAJAR 13 TAHUN

Berdasarkan data tahun 2023, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Banggai yaitu 8,63 Tahun. Oleh karena itu dalam Upaya percepatan penuntasan wajar Dikdas 9 Tahun, sebagai fondasi menuju wajar 13 tahun dalam

Banggai Emas 2045, penanganan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah menjadi prioritas, dan akan di tangani secara multi sektor, di samping Upaya untuk membenahi sarana prasarana Pendidikan serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.



Inovasi Satu Juta Satu Pekarangan yang telah kami laksanakan di Periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu antara lain dapat di klaim sebagai salah



4

GERMAS PEMANFAATAN PEKARANGAN

satu penyebab turunnya angka kemiskinan ekstrim menjadi 0 % dan mampu mengendalikan inflasi di daerah. Olehnya itu program pemanfaatan pekarangan ini akan di masifkan secara masal menjadi satu Gerakan Masyarakat (Germas), agar menyentuh seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Banggai.



5

KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA MAJU DAN MANDIRI

Pelimpahan kewenangan kepada Camat di sertai anggaran yang memadai dan tambahan Dana Kelurahan agar setara dengan Dana Desa Terendah di Kabupaten Banggai akan di lanjutkan lebih efektif, efisien dan

transparan, untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan Pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan. Sedangkan Desa akan di percepat untuk mencapai kondisi/kategori Desa Maju dan Mandiri serta mengentaskan 2 desa terbelakang yang berada di pegunungan.



Partisipating Interest (PI) merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas melalui PI 10 %. Manfaat bagi daerah yaitu antara lain memberikan keuntungan/ Profit bagi BUMD yang akan



menambah pendapatan daerah. Selain itu memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan Blok Migas. Di Tahun 2023 Kabupaten Banggai telah membentuk BUMD Banggai Energi Utama, sebagai pengelola PI. Upaya Pemenuhan persyaratan dan Langkah-Langkah strategis untuk percepatan penrimaan PI telah di lakukan. Hal inilah yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedepan untuk terwujudnya PI 10 % di Kabupaten Banggai.



Sebagai pintu Gerbang Bagian Timur Sulawesi Tengah, Kota Luwuk dalam 5 tahun kedepan akan di tata dengan konsep kota tepian air (*Water Front City*). Akan di wujudkan sebagai kota hijau dan bersih (*green and clean*

city), dan juga akan di wujudkan sebagai Kota Gas. Luwuk Kota Gas di maksudkan adalah kondisi Kota luwuk yang telah tersedia jaringan gas kota sebagai pemenuhan kebutuhan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan menggunakan infrastruktur pipa gas. Dalam 5 tahun kedepan hal ini di prioritaskan untuk terwujud.



Pemusatan perkantoran Pemerintah Kabupaten Banggai di Kawasan Bukit Halimun di maksudkan untuk mempermudah serta mempercepat koordinasi dan komunikasi di antara sesama perangkat daerah, karena berada dalam satu



8

**PUSAT PERKANTORAN
HALIMUN**

Kawasan. Hal ini di kecualikan untuk unit kerja pelayanan publik. Pemusatan perkantoran di bukit halimun juga merupakan bagian dari Upaya penataan kota Luwuk.



9

**PERGURUAN TINGGI MAJU
DAN UNGGUL**

Kabupaten Banggai memiliki Perguruan Tinggi yang telah berumur kurang lebih 25 Tahun, yaitu Universitas Tompotika Luwuk dan Universitas Muhammadiyah Luwuk, serta satu Pendidikan diploma AMIK Nural

Luwuk. Ketiga PT ini telah melahirkan ribuan sarjana yang tersebar di beberapa wilayah timur Sulawesi, termasuk dari kepulauan Sula. Hal ini merupakan potensi yang dapat di kembangkan oleh Pemda untuk menjadikan Kabupaten Banggai (kota Luwuk) sebagai pusat pelayanan Pendidikan tinggi di Timur Sulawesi Tengah, melalui dukungan sarana prasarana dan tenaga pengajar melalui Hibah.



Selanjutnya Program Unggulan Kreatif dan Inovatif juga di jabarkan kedalam 9 PROGRAM AKSI yang lebih konkrit sebagai berikut:

1. **TANPA PUNGUTAN**, dalam semua bentuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, perizinan, serta layanan pemerintahan dan layanan publik lainnya.
2. **TANPA MISKIN EKSTRIM**, di lakukan melalui inovasi TUMIS IKAN TERI (Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi), untuk menjaga tumbuhnya miskin ekstrim baru , maupun kemiskinan absolut lainnya.
3. **TANPA KEKUMUHAN**, yaitu mengentaskan Kawasan Kumuh menjadi Kawasan yang layak huni.
4. **TANPA SAMPAH**, sebagai program untuk mewujudkan Luwuk Green and Clean city.
5. **BEBAS GELAP**, sebagai kelanjutan dari BANGGAI Terang, untuk peningkatan akses Masyarakat terhadap Listrik rumah tangga dan penerangan jalan.
6. **TANPA PUTUS SEKOLAH**, sebagai kelanjutan inovasi Anak dan Dewasa Kembali ke sekolah.
7. **AMBULANCE DERING**, sebagai pengembangan dari Inovasi Ambulance Dering Ibu Hamil, yang di perluas kepada seluruh jenis pelayanan Kesehatan, dengan jangkauan yang di perluas.
8. **GERMAS PEMANFAATAN PEKARANGAN**, sebagai pengembangan dari Inovasi 1 Juta 1 Pekarangan, akan di masalkan kepada seluruh Rumah Tangga di pawkotaan dan perdesaan menjadi Gerakan Masal/Masyarakat.
9. **UGD KEMISKINAN**, merupakan Unit Gawat Darurat yang bertugas melayani dan menyelesaikan masalah-masalah yang di alami Masyarakat miskin secara cepat, tepat dan responsif.



4.3.2 Kebijakan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Periode 2025–2030.

Dalam Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029 di tetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana matriks berikut :

Tabel 4.5
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025 - 2029

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : SDM Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	1.1 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.	1.1.1 Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi
		1.1.2 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
		1.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja
		1.1.4 Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara
		1.1.5 Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Moderasi Beragama
		1.1.6 Meningkatnya daya saing Pemuda dan olah raga
Misi 2 : Ekonomi Daerah Tangguh dan Inklusif Berbasis Potensi Unggulan	2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah	2.1.1 Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif secara berkelanjutan.
		2.1.2 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk



Misi	Tujuan	Sasaran
		Mendukung Perekonomian Daerah.
Misi 3 : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Berkualitas, Merata dan Ramah Lingkungan.	3.1 Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas	3.1.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
		3.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana konektivitas yang Berkualitas dan Merata untuk mendukung Aktivitas Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan
	3.2 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup	3.2.1 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
		3.1 Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan
Misi 4 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	4.1 Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	4.1.1 Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru
		4.1.2 Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri yang di tandai dengan berkembangnya ekonomi perdesan
Misi 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	5.1 Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan.	5.1.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah
		5.1.2 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan Daerah



Misi	Tujuan	Sasaran
		5.1.3 Meningkatkan Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana di atas, kemudian di rumuskan perubahan Prioritas Daerah Tahun 2025 yang nantinya merupakan prioritas 5 (lima) tahunan dari RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029. Prioritas Daerah di ambil dari Tujuan setiap Misi yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah
3. Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas
4. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup
5. Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
6. Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan.

Penyelarasan Perubahan Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Daerah dalam RKPD Murni Tahun 2025, adalah sebagaimana table 4.6 berikut :



Tabel 4.6
Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam RPJMD
2021–2026 dengan Perubahan Prioritas Daerah Tahun 2025

Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam RPJMD 2021–2026	Perubahan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2025	
1. Pembangunan Manusia Berkualitas dan berdaya saing	PD 1	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.
2. Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi	PD 2	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah
	PD 5	Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
3. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 3	Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas
	PD 5	Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
4. Ketahanan Pangan	PD 2	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah.
5. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan	PD 2	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah	PD 4	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup
7. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama	PD 1	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.



Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam RPJMD 2021–2026		Perubahan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2025	
		PD 2	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah
8. Penguatan Birokrasi.	Reformasi	PD 6	Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan

Selanjutnya keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025		
	Nasional	Sulawesi Tengah	Banggai
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Berani Berintegritas	PD 1 : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera. PD 6 : Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan
2.	Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	▪ Berani Makmur ▪ Berani Sejahtera ▪ Berani Berintegritas	PD 2: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah PD 3 : Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana



No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025		
	Nasional	Sulawesi Tengah	Banggai
			Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas PD 5 : Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	▪ Berani Cerdas ▪ Berani Sehat ▪ Berani Lancar ▪ Berani Harmoni	PD 1 : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera. PD 2 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah PD 3 : Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas PD 5 : Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta Penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	▪ Berani Cerdas ▪ Berani Sehat ▪ Berani Sejahtera	PD 1: Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.



No	Prioritas Pembangunan Tahun 2025		
	Nasional	Sulawesi Tengah	Banggai
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	▪ Berani Makmur ▪ Berani Harmoni	PD 2: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	▪ Berani Makmur ▪ Berani Sejahtera	PD 2 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah PD 5 : Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi, dan penyelundupan	▪ Berani Berintegritas ▪ Berani Berkah	PD 6 : Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dan Berkelanjutan
8.	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	▪ Berani Harmoni ▪ Berani Berkah ▪ Berani Makmur	PD 1: Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera. PD 4: Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup



Setiap prioritas daerah ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran dimaksud bersesuaian dengan sasaran dalam Draft Ranwal RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, sekaligus merupakan Sasaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025. Adapun sasaran daerah berdasarkan masing-masing prioritas daerah, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Perubahan Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2025

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Perubahan Target 2025
1.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai yang Berbudaya, Produktif dan Sejahtera.				
	a. Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata.	1. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
		Literasi Membaca :			
		- SD	Skor	53,81	53,81
		- SLTP	Skor	64,88	64,88
		Numerasi :			
		- SD	Skor	48,84	48,84
		- SLTP	Skor	58,66	58,66
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,72	8,96
		3. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,51
		4. Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) (5-6 Tahun)	Persen	77,55	77,55
		5. Angka Partisipasi Sekolah (7-15 Tahun) (SD/SMP)	Persen	97,6	97,6
	b. Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi.	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	71,80	72,36
		2. Kesehatan Ibu dan Anak :			
		3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	160	160
		4. Prevalensi Stunting (SGGI)	Persen	24,1	24,1
		5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,5	99,5



No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Perubahan Target 2025
	c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Angka Kemiskinan	Persen	6,00–6,18	6,27–6,51
		2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	48,31	71,7
		3. Persentasi Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal*	Persen	1,2	1,2
		4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	72,05	72,05
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,88–3,00	2,74–3,00
		6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	57,90–58,28	57,90–58,28
	d. Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Gender yang setara.	1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	79,3	79,3
		2. Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,439–0,207	0,439–0,207
		3. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,00	91,00
		4. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Kategori	Rendah	Rendah
		5. Angka Kemiskinan	Persen	6,00–6,18	6,00–6,18
		6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	58	58
		7. Persentasi Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal*	Persen	1,2	1,2
	e. Terwujudnya Kebudayaan Daerah yang Maju dan Moderasi Beragama.	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	Sedang	Sedang
		2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	79,3	79,3
	f. Meningkatkan daya saing Pemuda dan olah raga.	1. Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	40,51	40,51
		2. Indeks Pembangunan Olah Raga	Indeks	0,2	0,2
2.	Pertumbuhan Ekonomi Daerah Inklusif dan Berkelanjutan berbasis potensi unggulan Daerah				
	a. Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,61–5,00	4,61–5,00
		Inflasi Daerah	Persen	2,0–4,0	2,0–4,0
		Pertumbuhan sektor pertambangan dan Penggalian dalam PDRB	Persen	2,54	2,54



No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Perubahan Target 2025
	secara berkelanjutan.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	35,00–38,41	35,00–38,41
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata			
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum*	Persen	0,26–0,35	0,26–0,35
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan orang)*	Ribu orang	1,50–2,00	1,50–2,00
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	2,40	2,40
		Persentase Koperasi Aktif dan Berkualitas/modern	Persen	77,988	77,988
		Persentase UMKM Naik Kelas/Go Digital	Persen	86,50	86,50
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persen	8	8
		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen	0,01	0,01
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	Persen	1,28	1,28
	b. Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	Persen	8,71	8,71
		Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IPKD)	Indeks	86,80	86,80
		Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	m ³ /detik	0,3–0,6	0,3–0,6
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Rasio	50	50
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,6	83,6
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	%	2,3	2,3
3.	Penyediaan, Pemenuhan dan Pemerataan Sarana Prasarana Dasar, TIK dan Konektivitas				
	a. Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	45	45
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	89,34	89,34
	b. Tersedianya sarana dan	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi*	Indeks	5,50	5,50



No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Perubahan Target 2025
	prasarana konektivitas yang Berkualitas dan Merata untuk mendukung Aktivitas Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Desa yang telah memiliki akses terhadap jaringan internet	Persen	49	49
		Konsumsi Listrik Per Kapita	KWh	N/A	N/A
		Persentase Luas sawah beririgasi	Persen	90	90
		Persentase Kondisi Jalan Mantap Kabupaten	Persen	65	65
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan sektor transportasi	Indeks	0,364	0,364
4.	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta kelestarian Lingkungan Hidup				
	a. Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	147,48	147,48
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,39	0,39
	b. Terwujudnya Tata Ruang, lingkungan hidup yang berkualitas, lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	83,28	83,28
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) :			
		Kumulatif	Ton CO ₂ eq	609.706,30	609.706,30
		Tahunan	Juta Ton CO ₂ eq	-	-
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	7,16	7,16
		Pengelolaan Sampah :			
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	19	19
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	18	18
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	75	75
5.	Pemekaran Wilayah, Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan				
	a. Terwujudnya pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan	Persentase realisasi pemekaran Desa/Kelurahan, Kecamatan dan pembentukan DOB Baru	Persen	20	20



No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Perubahan Target 2025
	pembentukan DOB Baru				
	b. Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri yang di tandai dengan berkembangnya ekonomi perdesan	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	72,50	72,50
		BUMDes Sehat	Persen	49,50	49,50
6.	Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak				
	a. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Inovatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	B	B
	b. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	Sangat Baik	Sangat Baik
		Nilai LPPD	Predikat	Baik	Baik
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3
		Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3
		Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks	Baik	Baik
		Nilai SAKIP	Predikat	A	BB
	c. Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur	Nilai Kematangan Organisasi	Nilai	N/A	N/A
		Indeks Sistem Merit	Kategori	Baik	Baik

Selain sasaran dan target sebagaimana pada tabel diatas, ditetapkan juga target Perubahan Sasaran Makro tahun 2025 yang mengacu pada Perubahan sasaran Pembangunan Nasional 2025 dan target kewilayahan pulau sulawesi serta sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2025, sebagaimana disandingkan dalam tabel 4.9 berikut :



Tabel 4.9
Persandingan Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi	Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional 2025	Perubahan Sasaran Pembangunan Sulawesi Tengah 2025	Perubahan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,6	10,0 - 10,50	4,61–5,00
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5–5,0	2,5 - 3,0	2,88 - 3,00
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0–8,0	10,85 - 11,0	6,00–6,51
4.	Indeks Gini Rasio (Poin)	0,379–0,382	0,300 - 0,305	0,268–0,300
5.	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	0,56	0,51	72,86–73,50
6.	Inflasi (%)	± 3	2,5 –3,0	2,00–4,00

Selanjutnya perubahan prioritas daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 tersebut di atas juga di jabarkan dan di kaitkan dengan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang harus di laksanakan dan di wujudkan di tahun 2025 sebagaimana tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Keterkaitan Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2025 dengan NAWAITU 2025–2029

Perubahan Prioritas Daerah Tahun 2025	NAWAITU Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2025 - 2029
1. Pembangunan Manusia Unggul, Berbudaya Dan Berdaya Saing	Gerbang Cerdas Gerbang Sehat Gerbang Produktif Sejahtera Gerbang Berbudaya
2. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Menuju Banggai Swasembada Pangan	Gerbang Pangan



Perubahan Prioritas Daerah Tahun 2025	NAWAITU Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2025 - 2029
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan daerah dan pemanfaatan IPTEK	Gerbang Produktif Sejahtera Gerbang Pangan Gerbang Desa Gerbang Digital dan Terang
4. Mengembangkan Sarana Prasarana Konektivitas, Pelayanan Dasar, TIK Dan Transformasi Digital	Gerbang Digital dan Terang Gerbang Layak, Bersih dan Lancar
5. Penataan Ruang, Ketahanan Ekologi, Adaptasi Dan Mitigasi Bencana.	Gerbang Layak, Bersih dan Lancar
6. Pembangunan Wilayah dan Desa yang Merata dan Berkeadilan	Gerbang Desa
7. Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak	Gerbang Amanah

9 Program Unggulan Kreatif dan Inovatif sebagai NAWAITU Pertama dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpili periode 2025–2030 di jabarkan kedalam kegiatan-kegiatan prioritas, yang akan di sesuaikan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai Nomenklatur Program sebagaimana tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11
Jabaran Program Unggulan Kreatif dan Inovatif
(Nawaitu 2025–2029) kedalam kegiatan Prioritas, Program
Nomenklatur dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

No.	Nawaitu 2025 - 2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1.	Gerbang Cerdas		
	a. Beasiswa Untuk Siswa dan Mahasiswa Miskin b. Bea Siswa untuk Guru. c. Hibah Pengembangan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pendidikan



Nawaitu 2025 - 2029			
No.	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	untuk Perguruan Tinggi Daerah d. Penerapan Dana Operasional Sekolah (DOS) untuk mendukung BOS e. Dukungan pembelajaran berbasis digital f. Pengembangan perpustakaan digital dan perpustakaan daerah g. Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SMP sesuai standar h. Gerakan kembali ke sekolah bagi anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah (ADE kembali sekolah) i. Tanpa pungutan di sekolah	3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan. 6. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan Perpustakaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bappeda Dinas Sosial
2.	Gerbang Sehat		
	a. Kesehatan Gratis melalui Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan (UHC Prioritas). b. Status BLUD untuk 27 Puskesmas c. Rintisan Rumah Sakit Tipe C atau D di 4 wilayah prioritas. d. Pengembangan Sarana Prasarana dan Peningkatan kualitas layanan RSUD Luwuk sebagai Rumah Sakit Rujukan. e. Dukungan Makan Bergizi Gratis f. Peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan Tingkat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 5. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan 1. Program Pembinaan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Luwuk P2KBP3A



Nawaitu 2025 - 2029			
No.	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	Pertama. g. Penurunan kematian Ibu dan Bayi melalui penguatan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care, kunjungan neonatal dan nifas sesuai standar, melalui pengembangan Inovasi Ambulance dering Ibu Hamil. h. Penurunan Stunting melalui penanggulangan KEK pada Ibu Hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, pemenuhan ASI eksklusif dan pendampingan pada keluarga beresiko stunting serta Pengembangan inovasi Stunting i. Pengembangan Olah Raga Masal untuk pola hidup sehat. j. Pemerataan Tenaga Kesehatan	Keluarga Berencana (KB) 2. Program Pengendalian Penduduk Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda Sekretariat Daerah
3.	Gerbang Produktif Sejahtera		
	a. Peningkatan pelatihan Vokasional/ pelatihan kerja di LLK Luwuk maupun melalui program kemitraan/ pemagangan. b. Pelatihan life skill di PKBM. c. UMKM Naik Kelas d. Pengembangan Industri Kreatif e. PI 10 % melalui BEU f. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri,	1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 3. Program Pemenuhan Hak Anak 4. Program Perlindungan Khusus Anak Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	P2KBP3A Sekretariat Daerah Dinas Sosial



Nawaitu 2025 - 2029			
No.	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	Wirausaha Sosial dan Komunitas.	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
	g. Perlindungan sosial melalui pemberian modal usaha, perijinan dan pendampingan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, kepala keluarga Perempuan miskin dan penyandang disabilitas.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Dinas Tenaga Kerja
	h. Pemenuhan dan pengendalian harga bahan pokok murah dan bahan penting lainnya	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
	i. Pemberdayaan Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PTSP
	j. Perwujudan Kabupaten Layak Anak, Sekolah Ramah Anak untuk pemenuhan Hak Anak.		
	k. Kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha.		
	l. Inovasi TUMIS IKAN TERI berbasis DTSEN		
	m. UGD Kemiskinan		
	n. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan.		
4.	Gerbang Berbudaya		
	a. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan BABASALAN (seni, adat istiadat, bahasa daerah, cagar budaya, museum daerah dan olah raga tradisional)	1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Dinas Pariwisata
	b. Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas (KM 5, Teluk Lalong, Salodik dan Pulo Dua).	2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
	c. Pengembangan Kampung /Desa Wisata)	3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		4. Program Pemasaran Pariwisata	



Nawaitu 2025 - 2029			
No.	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	d. Moderasi Beragama dan pengembangan wawasan kebangsaan	5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.	Dinas Pendidikan
		Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dinas PMD
5.	Gerbang Desa		
	a. Satu BUMDes 500 Juta b. Dukungan Koperasi Merah Putih c. Desa Maju dan Mandiri d. Desa/Kampung Wisata dan Tematik Lainnya	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat. 2. Program Penataan Desa 3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi 2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
6.	Gerbang Pangan dan Pekarangan		
	a. Germas pemanfaatan pekarangan, pengembangan 1 Juta 1 Pekarangan.	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Dinas TPHP 2. Dinas Peternakan
	b. Banggai Sejuta Ternak		



No.	Nawaitu 2025 - 2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	c. Pengarusutamaan produk unggulan kelapa d. Bantuan Alat Tangkap dan Budidaya ikan. e. Banggai Smart Farming. f. Industrialisasi pangan untuk diversifikasi dan daya saing produk pangan.	3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
7.	Gerbang Digital dan Terang		
	a. Bebas Gelap (Akses Rumah Tangga ke listrik PLN dan Lampu Jalan). b. Bebas Blank Spot c. Kabupaten Kota pintar dan Desa pintar. d. Banggai Comand Centre e. Penarapan open Data, Satu Data Banggai. f. Penguatan SDM Digital g. Peningkatan Infrastruktur TIK h. Digitasilisasi Sektor ekonomi (koperasi	1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.	Dinas Kominfo
		1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perkimtan



Nawaitu 2025 - 2029			
No.	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
	Modern dan UMKM Go Digital) i. Pengembangan Platform Digital	2. Program Pengembangan Perumahan. 3. Program Kawasan Permukiman. 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu).	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
8.	Gerbang Layak, Bersih dan Lancar		
	a. Banggai Tanpa Kekumuhan. b. Rintisan penerapan Smart Water Grid Management (SWGM) atau PDAM pintar. c. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir menuju ekonomi sirkular d. Peningkatan kemantapan jalan Kabupaten. e. Penataan Luwuk Water Front City, Green and Clean City dan Luwuk Kota Gas f. Kawasan Perkantoran Halimun g. Penanganan Banjir Kota Luwuk	1. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional. 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Penataan Bangunan Gedung 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkimtan



No.	Nawaitu 2025 - 2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Penanggulangan Bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).	Dinas Perhubungan
9.	Gerbang Amanah		
	a. Banggai RB dan SAKIP A. b. Digitalisasi pelayanan publik c. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). d. Penguatan kembali Laboratorium Inovasi untuk mewujudkan Banggai Inovatif. e. Kolaborasi pelaku Pembangunan dengan pendekatan PENTAHELIX. f. Perencanaan dan Penganggaran untuk APBD Sehat. g. Penerapan System merit dan manajemen talenta. h. Peningkatan Fiskal Daerah	1. Program Penataan Organisasi 2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4. Program Penataan Organisasi 5. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 6. Program Kesejahteraan Rakyat 7. Program Perekonomian dan Pembangunan 8. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 9. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Sekretariat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda



No.	Nawaitu 2025 - 2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BRIDA
		1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Satpol PP
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Dukcapil
		Program Pelayanan Penanaman Modal.	DPMPSTP
		1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Kominfo



No.	Nawaitu 2025 - 2029		
	Program Unggulan Kreatif dan Inovatif	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
		3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
		1. Program Pengelolaan Arsip 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 3. Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa. 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan & Kelurahan

Perubahan Sasaran dan target prioritas daerah sebagaimana tabel di atas berkonsekuensi terhadap target program dan kegiatan prioritas di setiap perangkat daerah. Penyesuaian Target program dan kegiatan berdasarkan kewenangan dimaksud disajikan pada lampiran program dan kegiatan per perangkat daerah.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Perubahan Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2025

Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 juga akan menjadi arahan dan pedoman dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan tahunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk merealisasikan setiap program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dan target pada RKPD Tahun 2025, serta memperhatikan dan mempertimbangkan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih periode 2021–2026 sesuai Visi dan Misinya, maka diperlukan perubahan kegiatan, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1. Pergeseran Anggaran Tahun 2025

Pergeseran anggaran tahun 2025 yang dilakukan mendahului perubahan APBD adalah Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar



pelaksanaannya. Sedangkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja tidak dapat dilakukan mendahului perubahan APBD. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan untuk Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan pada Belanja Daerah, antara lain:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebelumnya sebesar Rp2.685.101.874.000,00 berubah menjadi Rp2.510.706.542.000,00 atau berkurang sebesar Rp174.395.332.000,00 Pengurangan terjadi pada :
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pengurangan target yang semula sebesar Rp944.475.847.000,00 menjadi sebesar Rp918.990.879.000,00, berkurang sebesar Rp25.484.968.000,00. Penyesuaian tersebut pada Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum; Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah sebesar Rp1.089.636.000,00 dari target semula sebesar Rp238.240.036,00 sehingga menjadi sebesar Rp239.329.672.000,00. Penyesuaian target anggaran dimaksud yaitu penambahan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun



Anggaran 2025) yaitu penyesuaian operasional penyuluh;

- a. Belanja Operasi sebelumnya sebesar Rp2.226.206.802.202,97 berubah menjadi Rp2.289.623.403.190,97 atau bertambah sebesar Rp63.416.600.987,50 Penambahan terjadi pada :
 - a) Belanja Barang Jasa semula Rp1.049.701.895.008,00 berubah menjadi Rp1.039.072.203.168,91 serta terjadi pengurangan pada belanja jasa sebesar Rp10.629.691.839,86;
 - b) Belanja Hibah semula sebesar Rp53.632.301.248,20 Berubah menjadi Rp61.035.800.882,20 serta terjadi penambahan pada Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp7.403.499.634,00;
- b. Belanja Modal semula sebesar Rp609.922.599.056,03 Berubah menjadi Rp605.316.670.834,53 Serta berkurang sebesar Rp4.605.928.221,50 Penambahan terjadi pada :
 - a) Belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi semula Rp289.313.150.851,61 Berubah menjadi Rp276.858.564.885,42 Berkurang menjadi Rp12.454.585.966,19;
- c. Belanja Tidak terduga semula sebesar Rp10.284.301.600,00 Berubah menjadi Rp11.162.983.600,00 Berkurang menjadi Rp878.682.000,00;



2. Penambahan, Penghapusan dan Pengurangan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan di dalam RKPD Tahun 2025, baik judul kegiatan, capaian dan target indikator, pagu indikatif serta lokasi kegiatan masih terdapat ketidakselarasan antara RKPD 2025 dengan APBD 2025. Berkenaan hal tersebut, serta berdasarkan pergeseran anggaran mendahului perubahan sebagaimana di atas, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan RKPD 2025 terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan anggaran, penambahan kegiatan, penghapusan kegiatan dan pengurangan anggaran, sebagaimana di sajikan pada tabel 5.1 berikut



Tabel 5.1
Organisasi Perangkat Daerah/Perangkat Daerah
yang Melakukan Penambahan, Pengurangan dan Penghapusan Kegiatan Tahun 2025

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang
A	URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	URUSAN PENDIDIKAN												
	Dinas Pendidikan	6	6	6	0	15	15	15	0	89	89	89	0
2	URUSAN KESEHATAN												
	Dinas Kesehatan	7	7	7	0	21	21	21	0	60	60	60	0
	RSUD Luwuk	2	2	2	0	5	5	5	0	7	7	7	0
3	URUSAN PEKERJAAAN UMUM												
	PUPR	9	9	9	0	19	19	19	0	73	73	73	0
4.	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	6	6	6	0	15	15	15	0	46	46	46	0
5.	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
	Satpol PP	2	2	2	0	6	6	6	0	22	22	22	0
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0	5	5	5	0	34	34	34	0
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0	5	5	5	0	27	27	27	0
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	Dinas Sosial	4	4	4	0	11	11	11	0	59	59	59	0



No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
7.	URUSAN TENAGA KERJA												
	Dinas Tenaga Kerja	3	3	3	0	13	13	13	0	20	20	20	0
8.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK												
	DP2KBP3A	6	6	6	0	17	17	17	0	10	10	10	0
9.	URUSAN PANGAN												
	Dinas Ketahanan Pangan	6	6	6	0	10	10	10	0	19	19	19	0
10.	URUSAN PERTANAHAN												
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2	2	2	0	4	4	4	0	10	10	10	0
11.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												
	Dinas Lingkungan Hidup	7	7	7	0	22	22	22	0	37	37	37	0
12.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL												
	Dinas kependudukan dan Capil	2	2	2	0	11	11	11	0	32	32	32	0
13.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	7	7	0	17	17	17	0	44	44	44	0
14.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												



No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	2	0	5	5	5	0	10	10	10	0
15.	URUSAN PERHUBUNGAN												
	Dinas Perhubungan	3	3	3	0	15	15	15	0	37	37	37	0
16.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3	3	0	7	7	7	0	24	24	24	0
17.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
	Dinas Koperasi dan UKM	5	5	5	0	8	8	8	0	20	20	20	0
18.	URUSAN PENANAMAN MODAL												
	DPMPTSP	3	3	3	0	6	6	6	0	21	21	21	0
19.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5	5	5	0	13	13	13	0	28	28	28	0
20.	URUSAN STATISTIK												
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	0	5	5	5	0	10	10	10	0
21.	URUSAN PERSANDIAN												
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	0	2	2	2	0	10	10	10	0
22.	URUSAN KEBUDAYAAN												
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	2	2	0	5	5	5	0	7	7	7	0
23.	URUSAN PERPUSTAKAAN												
	Dinas Perpustakaan	3	3	3	0	9	9	9	0	27	27	27	0



No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang
24.	URUSAN KEARSIPAN												
	Dinas Perpustakaan	1	1	1	0	5	5	5	0	7	7	7	0
C	URUSAN PILIHAN												
25.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	Dinas Perikanan	5	5	5	0	17	17	17	0	25	25	25	0
26.	URUSAN PARIWISATA												
	Dinas Pariwisata	3	3	3	0	11	11	11	0	52	52	52	0
27.	URUSAN PERTANIAN												
	Dinas TPHP	5	5	5	0	14	14	14	0	29	29	29	0
	Dinas Peternakan	4	4	4	0	10	10	10	0	21	21	21	0
28.	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												
	Dinas Perdagangan	-	-	-	0				0				0
29.	URUSAN PERDAGANGAN												
	Dinas Perdagangan	4	4	4	0	13	13	13	0	38	38	38	0
30.	URUSAN PERINDUSTRIAN												
	Dinas Perdagangan	2	2	2	0	5	5	5	0	15	15	15	0
31.	URUSAN TRANSMIGRASI												
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	2	2	0	5	5	5	0	10	10	10	0
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	24	24	24	0	66	66	66	0
	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	17	17	17	0	72	72	72	0
E	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	PERENCANAAN												
	Bappeda	3	3	3	0	8	8	8	0	53	53	53	0
	KEUANGAN												
	BPKAD	3	3	3	0	7	7	7	0	63	63	63	0
	Badan Pendapatan	3	3	3	0	5	5	5	0	28	28	28	0



No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Tambah/ Kurang
	KEPEGAWAIAN												
	BKPSDM	2	2	2	0	12	12	12	0	23	23	23	0
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	BKPSDM	3	3	3	0	5	5	5	0	10	10	10	0
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	Badan Riset Daerah	2	2	2	0	5	5	5	0	10	10	10	0
F.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
	Inspektorat Daerah	3	3	3	0	15	15	15	0	45	45	45	0
G.	UNSUR KEWILAYAHAN												
	Kecamatan	5	5	5	0	8	8	8	0	32	32	32	0
H.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0	12	12	12	0	35	35	35	0
JUMLAH		146	146	146	0	314	314	314	0	1217	1217	1217	0

5.2 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Perubahan Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Perubahan Kerangka Pendanaan RKPD
Kabupaten Banggai Tahun 2025

Kode Akun	Uraian	APBD Tahun 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/ Berkurang
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.071.243.768.275,00	2.942.249.715.688,00	-128.994.052.587,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	294.503.902.299,00	294.503.902.299,00	-
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	138.118.188.864,00	138.118.188.864,00	-
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	27.915.711.026,00	27.915.711.026,00	-
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	5.714.244.284,00	-
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.755.758.125,00	122.755.758.125,00	-
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	2.751.894.983.788,00	2.622.900.931.201,00	-128.994.052.587,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.685.101.874.000,00	2.510.706.542.000,00	-128.994.052.587,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.793.109.788,00	112.194.389.201,00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	
4 3 03	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	
5	BELANJA	3.256.416.085.349,00	3.316.105.440.115,00	59.689.354.766,00
5 1	BELANJA OPERASI	2.226.206.802.202,97	2.289.623.403.190,97	63.416.600.987,50
5 1 01	Belanja Pegawai	1.122.468.605.946,00	1.189.111.399.139,36	66.642.793.193,36
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.701.895.008,77	1.039.072.203.168,91	-10.629.691.839,86
5 1 04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	404.000.000,00	-
5 1 05	Belanja Hibah	53.632.301.248,20	61.035.800.882,20	7.403.499.634,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
5 2	BELANJA MODAL	609.922.599.056,03	605.316.670.834,53	-4.605.928.221,50
5 2 01	Belanja Tanah	14.556.938.926,35	14.982.789.477,71	425.850.551,36
5 2 02	Belanja Peralatan dan Mesin	85.793.426.149,00	111.253.745.259,00	25.460.319.110,00
5 2 03	Belanja Gedung dan Bangunan	219.353.942.129,07	201.366.430.212,40	-17.987.511.916,67
5 2 04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.313.150.851,61	276.858.564.885,42	-12.454.585.966,19
5 2 05	Belanja Aset Tetap Lainnya	545.141.000,00	545.141.000,00	-
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	360.000.000,00	310.000.000,00	-50.000.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	10.284.301.600,00	11.162.983.600,00	878.682.000,00
5.3. 01	Belanja Tak Terduga	10.284.301.600,00	11.162.983.600,00	878.682.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	410.002.382.490,00	410.002.382.490,00	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.603.389.990,00	16.603.389.990,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.398.992.500,00	393.398.992.500,00	-
	Jumlah Belanja	3.256.416.085.349,00	3.316.105.440.115,00	59.689.354.766,00
	SURPLUS/DEFISIT	-185.172.317.074,00	-373.855.724.427,00	- 188.683.407.353,00

Kode Akun	Uraian	APBD Tahun 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/ Berkurang
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00	188.683.407.353,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	188.972.317.074,00	377.655.724.427,00	188.683.407.353,00
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pmda	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	185.172.317.074,00	373.855.724.427,00	188.683.407.353,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-		

Mendasari perubahan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 sebagaimana di atas, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, maka di rumuskan pagu indikatif per Perangkat Daerah sebagaimana tabel 5.3 berikut :



Tabel 5.3
Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

NO	NAMA SKPD	PAGU APBD PENETAPAN TAHUN 2025	PAGU RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025	SELISIH (+/-)
1	Dinas Pendidikan	673.450.773.228,00	676.483.566.040,00	3.032.792.812,00
2	Dinas Kesehatan	340.640.813.865,00	361.328.480.096,60	20.687.666.231,60
3	Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk	185.366.145.689,00	200.769.645.511,20	15.403.499.822,20
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	462.774.972.524,00	460.544.028.524,20	(2.230.943.999,80)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	21.809.049.255,00	21.943.811.528,80	134.762.273,80
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.409.346.971,00	16.983.060.495,20	1.573.713.524,20
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.616.671.455,00	12.622.928.578,60	6.257.123,60
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.556.014.083,00	12.458.916.482,80	(97.097.600,20)
9	Dinas Sosial	26.057.823.625,00	25.831.268.385,80	(226.555.239,20)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.762.206.794,00	11.646.012.017,80	1.883.805.223,80
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.060.269.307,00	23.007.379.388,00	947.110.081,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	13.222.917.750,00	13.455.037.804,60	232.120.054,60
13	Dinas Lingkungan Hidup	35.714.606.464,00	36.001.397.389,80	286.790.925,80
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.789.965.584,00	15.020.820.507,60	230.854.923,60



NO	NAMA SKPD	PAGU APBD PENETAPAN TAHUN 2025	PAGU RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025	SELISIH (+/-)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.092.355.874,00	21.529.606.902,20	2.437.251.028,20
16	Dinas Perhubungan	32.489.519.879,00	33.059.408.587,20	569.888.708,20
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	31.257.351.345,00	31.891.211.335,40	633.859.990,40
18	Dinas Koperasi dan UKM	11.931.223.474,00	12.738.351.582,00	807.128.108,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	15.961.089.573,00	16.189.110.494,40	228.020.921,40
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	22.584.429.024,00	22.973.480.812,80	389.051.788,80
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.401.642.925,00	12.109.576.140,60	707.933.215,60
22	Dinas Perikanan	20.002.755.396,00	20.203.706.386,40	200.950.990,40
23	Dinas Pariwisata	12.024.373.868,00	12.461.784.131,60	437.410.263,60
24	Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan	34.702.878.638,00	38.388.733.891,80	3.685.855.253,80
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	104.072.860.207,00	107.712.629.148,40	3.639.768.941,40
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.933.092.019,00	18.332.980.059,80	4.399.888.040,80
27	Sekretariat Daerah	174.790.830.230,00	212.183.327.785,60	37.392.497.555,60
28	Sekretariat DPRD	57.474.005.260,00	58.705.554.833,00	1.231.549.573,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.374.022.985,00	28.022.140.509,80	648.117.524,80
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	456.378.710.276,00	465.981.902.807,60	9.603.192.531,60
31	Badan Pendapatan Daerah	24.852.037.884,00	25.180.787.041,20	328.749.157,20
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.212.317.165,00	23.964.310.427,20	3.751.993.262,20
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	14.124.656.644,00	14.451.750.554,00	327.093.910,00



NO	NAMA SKPD	PAGU APBD PENETAPAN TAHUN 2025	PAGU RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025	SELISIH (+/-)
34	Inspektorat	26.412.399.547,00	26.613.072.060,40	200.672.513,40
35	Kecamatan Nuhon	8.574.662.734,00	8.574.662.734,00	55.238.851,00
36	Kecamatan Bunta	10.232.350.324,00	10.232.350.324,00	189.545.880,00
37	Kelurahan Bunta I	750.000.000,00	750.000.000,00	-
38	Kelurahan Bunta II	750.000.000,00	750.000.000,00	-
39	Kelurahan Salabenda	750.000.000,00	750.000.000,00	-
40	Kelurahan Kalaka	749.999.980,00	749.999.902,00	78,00
41	Kecamatan Pagimana	11.633.311.361,00	11.633.311.361,00	340.868,00
42	Kelurahan Pagimana	749.999.065,00	749.998.695,00	370,00
43	Kelurahan Pakowa	749.999.403,00	749.998.993,00	410,00
44	Kelurahan Basabungan	749.997.857,00	749.997.857,00	-
45	Kecamatan Bualemo	8.083.767.504,00	8.083.751.611,00	599.962.350,00
46	Kecamatan Balantak	9.951.833.422,00	9.951.833.422,00	195.735.537,00
47	Kelurahan Balantak	749.994.839,00	749.994.511,00	328,00
48	Kelurahan Talang Batu	749.998.872,00	749.998.292,00	580,00
49	Kelurahan Dale-Dale	749.988.368,00	749.988.240,00	128,00
50	Kecamatan Lamala	8.528.327.302,00	8.528.327.302,00	418.454.385,00
51	Kecamatan Masama	8.091.827.382,00	8.091.827.382,00	-88.160.761,00
52	Kecamatan Luwuk Timur	8.236.770.595,00	8.236.770.518,35	207.131.984,65
53	Kecamatan Luwuk	16.426.191.573,00	16.426.191.573,00	374.066.343,00
54	Kelurahan Mangkio Baru	749.999.730,00	749.963.200,00	36.530,00
55	Kelurahan Keleke	749.976.146,00	749.935.142,00	41.004,00
56	Kelurahan Bungin	749.998.789,00	749.998.312,00	477,00



NO	NAMA SKPD	PAGU APBD PENETAPAN TAHUN 2025	PAGU RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025	SELISIH (+/-)
57	Kelurahan Luwuk	749.988.912,00	749.988.912,00	-
58	Kelurahan Bungin Timur	749.999.460,00	749.999.280,00	180,00
59	Kelurahan Soho	749.999.577,00	749.999.577,00	-
60	Kelurahan Karaton	749.999.010,00	749.998.670,00	340,00
61	kelurahan Baru	749.959.314,00	749.959.314,00	-
62	Kecamatan Kintom	11.052.843.119,00	11.052.843.119,00	-154.120,00
63	Kelurahan Kintom	750.000.000,00	750.000.000,00	-
64	Kelurahan Mendono	749.448.475,00	749.999.571,00	-551.096,00
65	Kelurahan Mondonun	749.956.865,00	749.956.580,00	285,00
66	Kecamatan Batui	11.729.481.147,00	11.729.481.147,00	484.314.918,00
67	Kelurahan Tolando	750.000.000,00	750.000.000,00	-
68	Kelurahan Batui	750.000.000,00	750.000.000,00	-
69	Kelurahan Sisipan	750.000.000,00	749.999.740,00	260,00
70	Kelurahan Bakung	750.000.000,00	750.000.000,00	-
71	Kelurahan Balantang	750.000.000,00	750.000.000,00	-
72	Kelurahan Bugis	750.000.000,00	750.000.000,00	-
73	Kelurahan Lamo	749.935.460,00	749.935.460,00	-
74	Kecamatan Toili	8.711.956.764,00	8.711.956.764,00	680.161.367,00
75	Kelurahan Cendana	749.999.730,00	749.999.730,00	-
76	Kecamatan Toili Barat	8.343.261.657,00	8.343.261.657,00	420.965.118,00
77	Kecamatan Simpang Raya	7.734.836.945,00	7.734.836.945,00	212.303.921,00
78	Kecamatan Lobu	7.805.895.278,00	7.805.895.278,00	123.559.009,00
79	Kecamatan Moilong	7.477.778.393,00	7.477.778.393,00	309.473.738,00



NO	NAMA SKPD	PAGU APBD PENETAPAN TAHUN 2025	PAGU RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025	SELISIH (+/-)
80	Kecamatan Batui Selatan	7.596.575.887,00	7.596.575.887,00	345.048.039,00
81	Kecamatan Balantak Selatan	7.314.193.462,00	7.314.193.462,00	653.359.251,00
82	Kecamatan Nambo	12.142.270.463,00	12.142.270.020,00	-206.817.914,00
83	Kelurahan Nambo Lempek	749.999.200,00	749.995.846,00	3.354,00
84	Kelurahan Nambo Lempek Baru	749.999.383,00	749.998.855,00	528,00
85	Kelurahan Nambo Bosaa	749.948.904,00	749.948.753,00	151,00
86	Kelurahan Nambo Padang	749.988.425,00	749.977.887,00	10.538,00
87	Kelurahan Lontio	749.999.030,00	749.990.150,00	8.880,00
88	Kelurahan Lontio Baru	749.999.490,00	749.943.582,00	55.908,00
89	Kecamatan Luwuk Selatan	14.815.101.660,00	14.815.101.451,00	164.096.414,00
90	Kelurahan Tanjung Tuwis	749.998.938,00	749.998.914,00	24,00
91	Kelurahan Tombang Permai	749.999.593,00	749.955.963,00	43.630,00
92	Kelurahan Maahas	750.000.000,00	749.999.383,00	617,00
93	Kelurahan Bukit Mambual	750.000.000,00	749.999.490,00	510,00
94	Kelurahan Kompo	749.999.618,00	749.999.015,00	603,00
95	Kelurahan Simpong	749.998.700,00	749.814.914,00	183.786,00
96	Kelurahan Hanga-Hanga	749.999.650,00	749.999.650,00	-
97	Kelurahan Hanga-Hanga Permai	749.999.672,00	749.999.478,00	194,00
98	Kelurahan Jole	749.999.592,00	749.999.414,00	178,00
99	Kecamatan Luwuk Utara	10.152.075.151,00	10.152.075.151,00	169.287.483,00
100	Kelurahan Kilongan Permai	750.000.000,00	750.000.000,00	-
101	Kelurahan Kilongan	750.000.000,00	750.000.000,00	-
102	Kecamatan Balantak Utara	7.478.749.040,00	7.478.749.040,00	313.312.708,00



NO	NAMA SKPD	PAGU APBD PENETAPAN TAHUN 2025	PAGU RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025	SELISIH (+/-)
103	Kecamatan Mantoh	7.706.086.487,00	7.706.086.487,00	208.480.577,00
104	Kecamatan Toili Jaya	7.284.128.074,00	7.284.127.962,00	566.881.510,00
105	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.508.269.002,00	22.389.354.078,60	4.881.085.076,60
Total		3.256.416.085.349,00	3.316.105.440.115,02	59.689.354.766,02

Rincian Program, Kegiatan dan sub kegiatan masing – masing Perangkat Daerah di sajikan dalam lampiran Buku Perubahan RKPD ini. Daftar di maksud merupakan hasil print out dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2025 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025.